# KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENANGANI HAK NASABAH ATAS PELANGGARAN DALAM JASA KEUANGAN ONLINE

****

**S K R I P S I**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan program studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

**Disusun oleh :**

**GLADY ARGA MAROENA**

**5120600262**

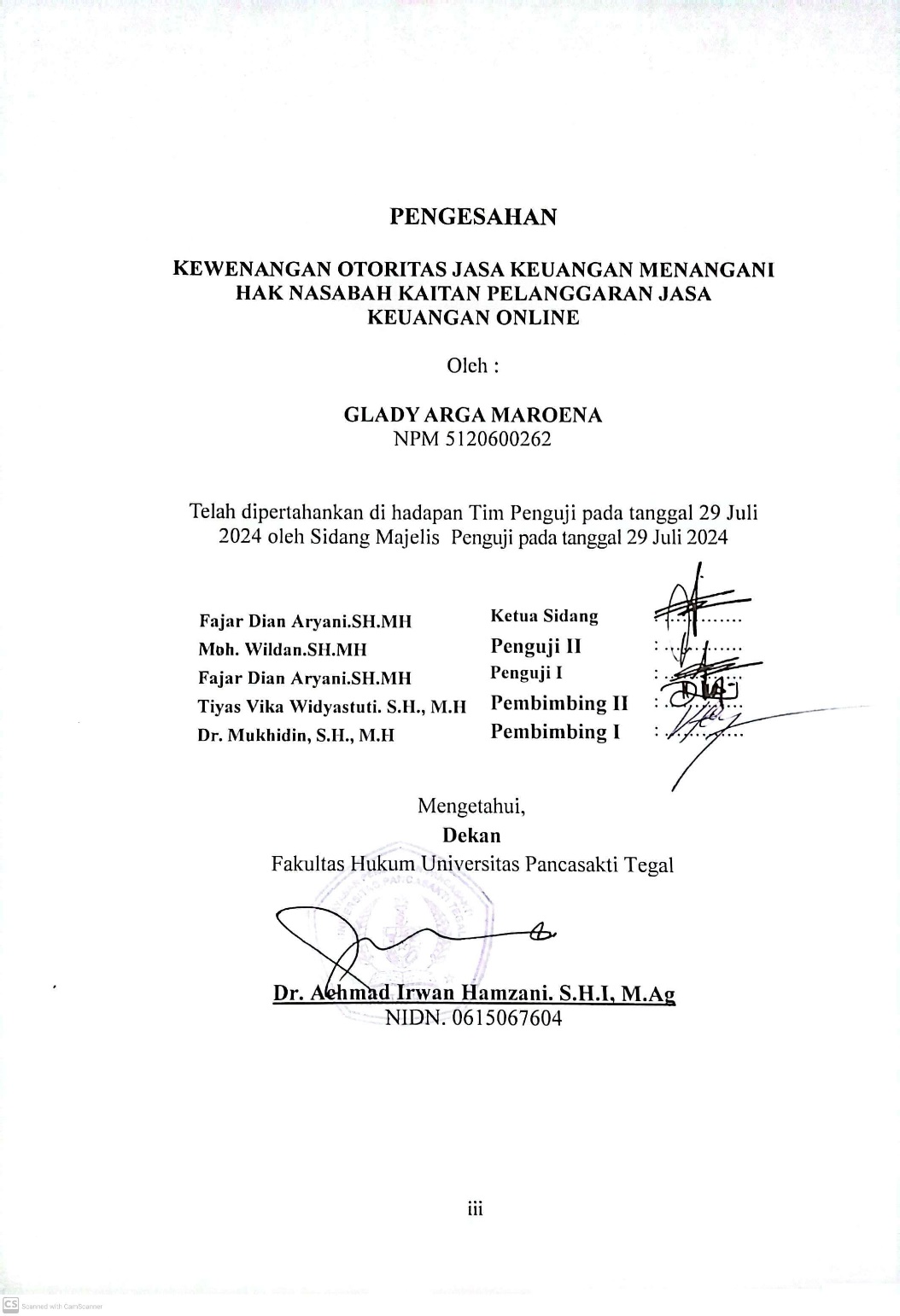
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

# LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

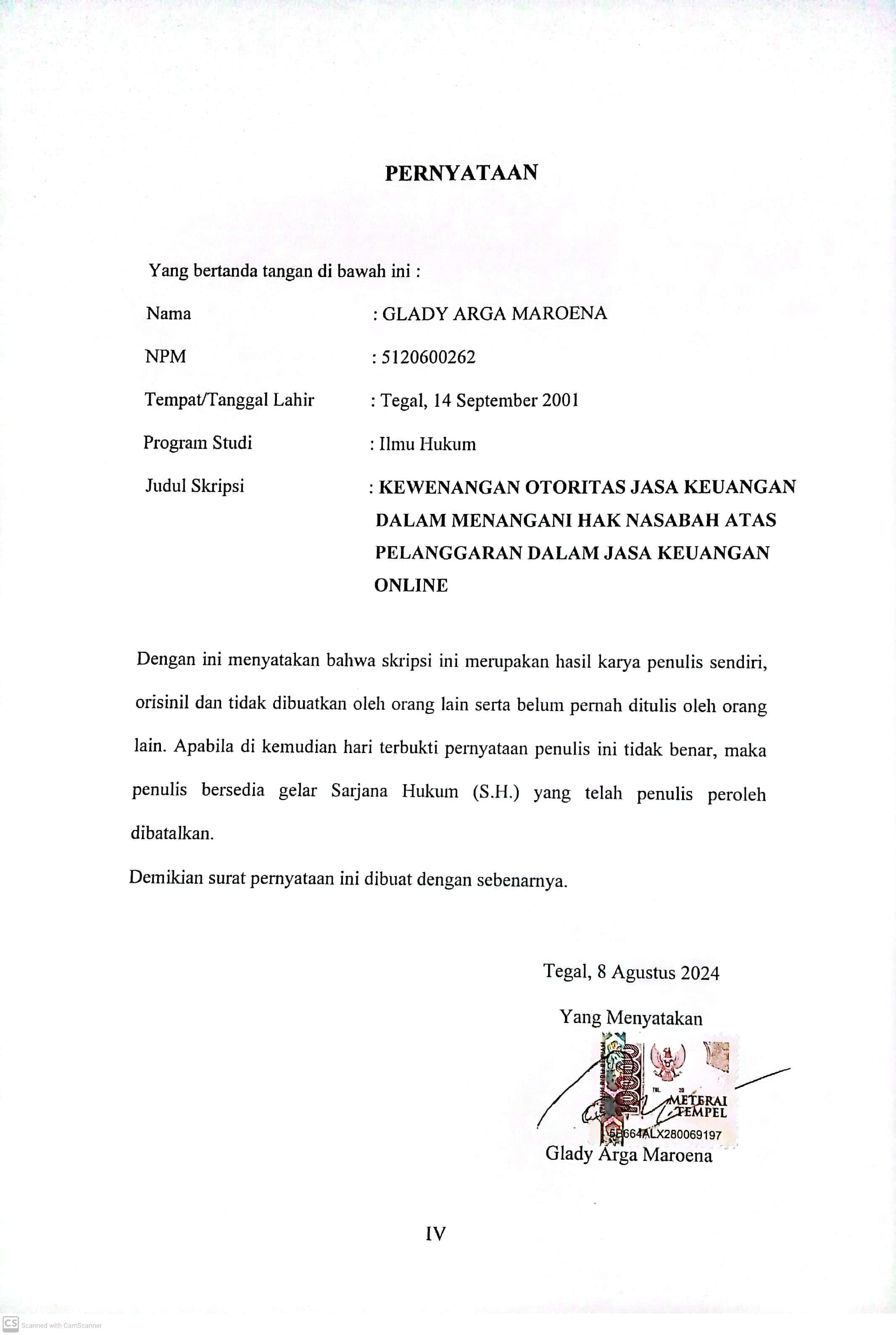
# LEMBAR PENGESAHAN



# LEMBAR KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

****

# LEMBAR PERNYATAAN



# ABSTRAK

Layanan pinjaman online (PINJOL) telah mengalami pertumbuhan pesat dalam era teknologi saat ini, namun juga memunculkan berbagai masalah yang memerlukan perhatian khusus, terutama terkait hak-hak nasabah. Banyak perusahaan fintech tidak memberikan informasi yang jelas tentang bunga, biaya, dan kondisi pinjaman, menyebabkan nasabah terjerat dalam siklus utang yang berulang. Terdapat juga laporan mengenai metode penagihan yang tidak etis dan intimidatif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatasi pelanggaran ini. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011, OJK memiliki otoritas untuk meregulasi dan mengawasi sektor perbankan, pasar modal, dan keuangan non-bank, termasuk pinjaman online. Melalui berbagai peraturan dan kebijakan, OJK berupaya melindungi konsumen dengan mewajibkan transparansi informasi dan melindungi data pribadi nasabah. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan pendekatan normatif dalam hukum, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OJK memiliki kewenangan yang kuat, terdapat tantangan dalam keterbatasan sumber daya dan proses penegakan hukum yang lambat. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara OJK, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem jasa keuangan yang aman dan terpercaya di Indonesia. Penelitian ini juga mengusulkan solusi untuk meningkatkan kinerja OJK dalam melindungi hak-hak nasabah.

**Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Pinjaman Online, Hak Nasabah, Fintech, Perlindungan Konsumen.**

# *ABSTRACT*

*Online loan services (PINJOL) have experienced rapid growth in today's technological age, but also raised a variety of issues that require special attention, especially related to customer rights. Many fintech companies do not provide clear information about interest, costs, and loan conditions, causing customers to get caught up in recurring debt cycles. There are also reports of unethical and intimidating billing methods. The Financial Services Authority (FSA) is responsible for monitoring and addressing these violations. Under Act No. 21 of 2011, the FSA has authority to regulate and oversee the banking, capital markets, and non-bank financial sectors, including online loans. Through various regulations and policies, OJK strives to protect consumers by imposing transparency of information and protecting customer's personal data. The research uses library methods and normative approaches in law, with a focus on the regulation of laws and legal doctrines. The results show that although the OJK has strong authority, there are challenges in limited resources and slow law enforcement processes. Therefore, collaboration between the NGOs, the government, and the public is needed to create a secure and reliable financial services ecosystem in Indonesia. The research also proposes solutions to improve OJK performance in protecting customer rights****.***

***Keywords: Financial Services Authority, Online Loans, Customer Rights, Fintech, Consumer Protection.***

# KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, kebaikan, dan hidayah-Nya yang telah mendampingi setiap langkah penulis hingga titik ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Hak Nasabah atas Pelanggaran dalam Jasa Keuangan Online.**" atas izin Allah SWT. Tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata Satu di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menemui berbagai tantangan dan hambatan yang memperlambat proses pengerjaannya. Namun, berkat doa, kerja keras, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Dr. H. Mukhidin, S.H., M.H. dan Ibu Tiyas Vika Widyastuti H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk membimbing penulis. Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih atas saran, motivasi, serta kesabaran mereka dalam memberikan arahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum, civitas akademik yang telah memberikan ilmu, mendidik, dan membantu selama perkuliahan, serta staf tata usaha Fakultas Hukum yang selalu memberikan layanan saat penulis membutuhkan.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Aries Styono dan Ibu Titi Mulyati, yang selalu memberikan doa, dukungan, nasihat, motivasi, serta pengorbanan yang menjadi alasan penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang kepada Bapak dan Ibu.
8. Kakak tercinta Gagas Avief Haiqal dan adik tercinta Ghaida Tsuraya Pradani yang memberikan doa dan bantuan di tengah kesibukan mereka, serta menjadi tempat penulis mencurahkan hati selama di rumah.
9. Support Sistemku Intan Miliyarti Dewi tercinta, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan cinta, serta menjadi sandaran ketika dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat terdekatku, Umam, Tegar, Yudi, Nunu, Mirza, Hilmi, Willy, Tri, Anggun, Indra, Mirza, dan Dita, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan bantuan yang sangat berarti sepanjang proses penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas waktu, dukungan, dan bantuannya selama empat tahun ini, yang memberikan arti ketulusan dan kebersamaan hingga kita semua meraih gelar Sarjana Hukum.

Sekali lagi, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan serta doa. Semoga Allah membalas segala kebaikan mereka dan memberikan pahala di kemudian hari. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun bagi siapa saja yang membacanya.

Tegal, 3 Juli 2024



Glady Arga Maroena

# DAFTAR ISI

[HALAMAN JUDUL i](#_Toc174039181)

[LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii](#_Toc174039182)

[LEMBAR PENGESAHAN iii](#_Toc174039183)

[LEMBAR KETERANGAN BEBAS PLAGIASI iv](#_Toc174039184)

[LEMBAR PERNYATAAN v](#_Toc174039185)

[ABSTRAK vi](#_Toc174039186)

[*ABSTRACT* viii](#_Toc174039187)

[KATA PENGANTAR ix](#_Toc174039188)

[DAFTAR ISI xii](#_Toc174039189)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc174039190)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc174039192)

[B. Rumusan Masalah 5](#_Toc174039193)

[C. Tujuan Penelitian 6](#_Toc174039194)

[D. Urgensi Penelitian 6](#_Toc174039195)

[E. Tinjauan Pustaka 7](#_Toc174039196)

[F. Metode Penelitian 10](#_Toc174039197)

[1. Jenis Penelitian 10](#_Toc174039198)

[2. Pendekatan Penelitian 12](#_Toc174039199)

[3. Sumber Data 13](#_Toc174039200)

[4. Metode Pengumpulan Data 14](#_Toc174039201)

[5. Metode Analisis Data 14](#_Toc174039202)

[G. Sistematika Penulisan 15](#_Toc174039203)

[BAB II TINJAUAN KONSEPSIONAL 17](#_Toc174039204)

[A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan 17](#_Toc174039206)

[1. Definisi Kewenangan 17](#_Toc174039207)

[2. Jenis-Jenis Kewenangan 20](#_Toc174039208)

[3. Sumber-sumber Kewenangan 24](#_Toc174039209)

[B. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan 28](#_Toc174039210)

[1. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan 28](#_Toc174039211)

[2. Tugas dan Wewenang OJK 37](#_Toc174039212)

[C. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online 41](#_Toc174039213)

[1. Definisi Pinjaman Online 41](#_Toc174039214)

[2. Jenis-Jenis Pinjaman Online 45](#_Toc174039215)

[a. Pinjaman Online *Legal* 46](#_Toc174039216)

[3. Pelanggaran Pinjaman Online 51](#_Toc174039217)

[D. Tinjauan Umum Tentang Hak Nasabah 52](#_Toc174039218)

[1. Definisi Hak Nasabah 52](#_Toc174039219)

[2. Dasar Hukum Hak Nasabah 54](#_Toc174039220)

[E. Pengaduan Nasabah Bank Dugaan/Melanggar Pembuktian Kredit 61](#_Toc174039221)

[BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 65](#_Toc174039222)

[A. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Hak Nasabah Atas Pelanggaran Dalam Jasa Keuangan Online 65](#_Toc174039224)

[B. Hak-Hak Nasabah Atas Pelanggaran Pelaku Jasa Keuangan Melalui Online... 78](#_Toc174039225)

[1. Hak-hak Nasabah atau Konsumen 79](#_Toc174039226)

[2. Kewajiban Nasabah Peminjaman Online 89](#_Toc174039227)

[BAB IV 101](#_Toc174039228)

[PENUTUP 101](#_Toc174039229)

[A. Kesimpulan 101](#_Toc174039230)

[B. Saran 102](#_Toc174039231)

[DAFTAR PUSTAKA 103](#_Toc174039232)

[LAMPIRAN DOKUMENTASI 114](#_Toc174039233)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP 115](#_Toc174039234)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Layanan keuangan yang tersedia secara online salah satunya Pinjaman Online (PINJOL), Kini telah mengalami kemajuan signifikan di era teknologi global saat ini[[1]](#footnote-1). Salah satu pembaruan terkait *Fintecth* atau *Financial Technology* adalah pinjaman online, yang mendigitalisasikan jasa pinjaman uang secara online dengan instan melalui aplikasi ponsel mereka. Namun, di balik cara instan ini, terdapat problematika yang harus di berikan perhatian secara khusus terkait hak terhadap pelaku jasa keuangan online[[2]](#footnote-2).

Perusahaaan *Fintech* atau sebagai badan usaha jasa keuangan, baik pembiayaan atau dana untuk usaha produktif dan konsumtif, biasanya tidak memberikan data yang jelas dan menyeluruh dalam hal bunga, biaya, dan kondisi kelayakan yang terkait dengan pinjaman ini adalah salah satu pokok probematika yang sering terjadi dengan pinjaman online[[3]](#footnote-3). Hal ini dapat berdampak buruk kepada nasabah karena tidak menyadari berapa banyak yang harus mereka bayar. Ada probabilitas bahwa beberapa pelanggan terjatuh dalam siklus pinjaman online berulang kali-kali untuk membayar hutang sebelumnya.

Perusahaan pinjaman online sangat dikhawatir mengenai penyelenggaraan bisnis/usaha penagihan penipuan. Beberapa nasabah mengutarakan pendapat bahwa perusahaan keuangan online memakai cara yang buruk tidak etis dan seringkali menakutkan untuk mengumpulkan uang. Mereka bisa mengirimkan ancaman menggunakan sarana pesan teks atau telepon, atau mereka bahkan dapat menggunakan data pribadi konsumen sebagai metode untuk mendapatkan uang[[4]](#footnote-4).

Regulasi yang lebih kuat di sektor pinjaman online diperlukan untuk menangani problematika sepert ini. Pihak berwenang wajib memastikan penyedia layanan keuangan online sesuai dengan undang-undang dan etika. Sangat penting untuk menyerahkan informasi kepada pelanggan tentang minat, biaya, dan tanggung jawab lainnya. Pelanggan juga harus diberikan hak yang tepat untuk proses pinjaman, penyelesaian, dan denda jika pembayaran tertunda[[5]](#footnote-5).

Dunia keuangan yang perlu diperhatikan juga hak pelanggan dalam pelanggaran pinjaman online termasuk problematika yang tidak lepas dari kata urgensi. Ketika memakai layanan pinjaman online, nasabah memperoleh jaminan untuk dilindungan secara baik dan juga memperoleh informasi yang jelas, penjagaaan data pribadi, dan penyelesaian problematika yang adil. Sektor keuangan Indonesia diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki wewenang untuk memantau dan mengatasi pelanggaran hak nasabah terhadap pinjaman online[[6]](#footnote-6).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah institusi yang meregulasi dan memantau memberikan pengawasan keuangan di Indonesia memiliki tugas penting dalam mengatasi pelanggaran hak nasabah dalam pinjaman online. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki otoritas untuk meregulasi dan mengawasi semua operasi perbankan, sektor keuangan non-bank dan pasar modal Indonesia. Juga, OJK memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan sistem keuangan, melindungi konsumen, dan meningkatkan pengetahuan keuangan masyarakat Indonesia.[[7]](#footnote-7)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas serta peran untuk memantau dan mengatasi pelanggaran hak nasabah dalam hal pinjaman online melalui regulasi dan pengawasan.OJK telah mewajibkan persyaratan bisnis, keterbukaan informasi, pelaporan, dan penanganan masalah untuk melindungi nasabah dalam pinjaman online[[8]](#footnote-8)

Penelitian Maulani, dan Octavya, dalam jurnal yang berjudul Peran OJK Dalam Perlindungan Konsumen, dijelaskan peranan OJK ketika mengatasi pelanggaran hak nasabah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyelenggarakan regulasi serta pengawasan yang terlibat dalam seluruh operasi sektor pelayanan keuangan dengan gambaran tanggung jawab untuk melindungi konsumen, seperti melalui surat, situs web, dan email, dengan “Pelaku” (Pusat Edukasi, Layanan Konsumen, dan Akses Keuangan UMKM), Telfon, dan Fax.[[9]](#footnote-9), dan apabila diperlukan, OJK bisa memberi hukuman kepada seseorang yang melakukan perbuatan berupa pelanggaran atau mencabut izin usaha. Kolaborasi dapat dilakukan OJK dengan pihak seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika serta polisi, untuk menghentikan penyelenggaraan bisnis/usaha pinjaman online yang melawan hukum dan melindungi pelanggan dari penipuan, kerjasama ini bertujuan untuk menaikan koordinasi dalam penanganan pelanggaran pinjaman online serta meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi secara illegal[[10]](#footnote-10).

Terkait Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dalam Peraturan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK ini meregulasi persyaratan usaha, tata kelola, dan perlindungan konsumen untuk layanan pinjam meminjam uang yang berbasis TI, termasuk pinjaman online. Selain itu, POJK mengharuskan penyedia layanan untuk menyediakan informasi yang mudah dipahami dan transparan kepada pelanggan dan melindungi data pribadi pelanggan[[11]](#footnote-11).

Ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mergulasi hak konsumen dari pelaksanaan penyelenggaran bisnis yang defisit, termasuk pelanggaran hak konsumen untuk layanan keuangan, menurut peraturan lain yang membantu melindungi hak nasabah dalam pinjaman online. OJK memiliki kewajiban untuk mengawasi dan memproses lebih lanjut pelanggaran hak nasabah yang diatur dalam UU ini.

Tujuan untuk penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut kewenangan OJK dalam menangani pelanggaran hak nasabah dalam pinjaman online. Penelitian ini akan menyelidiki literatur terkait dan menganalisis peraturan dan kebijakan[[12]](#footnote-12) terkait untuk menemukan kelemahan dan masalah yang dihadapi OJK dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk melindungi hak nasabah. Dari identifikasi masalah ini, penelitian akan mengusulkan solusi dan saran untuk meningkatkan kinerja kewenangan OJK.

## Rumusan Masalah

Dalam pembahasan ini memiliki rumusan masalah terkait Kewenangangan OJK dalam menangani hak nasabah terhadap pelanggaran pinjaman online:

1. Bagaimana kewenangan otoritas jasa keuangan dalam menangani hak nasabah atas pelanggaran dalam jasa keuangan online?
2. Apa saja hak-hak nasabah atas pelanggaran pelaku jasa keuangan melalui online?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji kewenangan otoritas jasa keuangan dalam menangani hak nasabah atas pelanggaran dalam jasa keuangan online.
2. Untuk mengkaji saja hak-hak nasabah yang termasuk dalam atas pelanggaran pelaku jasa keuangan online

## Urgensi Penelitian

Sangat penting untuk melakukan penelitian tentang kewenangangan OJK dalam menangani hak nasabah terhadap pelanggaran pinjaman online karena banyak orang yang terjerat permasalahan terkait *fintech* pinjol dalam hal ini OJK sudah mengatur perlindungan nasabah dengan terus melindungi pelanggan sektor jasa keuangan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Tahun 2023 terdapat data kasus Pinjol Adakami yang terjadi di tahun lalu lebih tepatnya pada bulan september, di duga ada kejadian yang tidak mengenakan dari pihak Adakami sebagai Pinjol yang sudah terdaftar di OJK seperti menagih pihak korban dengan ujaran-ujaran kebencian dan ancaman yang membuat korban bunuh diri, hal ini ditunjukan dengan jelas bahwa ada pelanggaran hukum terjadi seperti pelanggaran konsumen pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) maka dari itu perlu di perjelas kembali kewenangan OJK terhadap pelanggaran seperti ini karena semakin di biarkan semakin banyak ketidaktahuan masyarakat terkait kewenangan OJK terkait pelanggaran hak nasabah terkait pinjaman online[[13]](#footnote-13).

## Tinjauan Pustaka

1. Permasalahan Teknologi Keuangan Illegal di Indonesia[[14]](#footnote-14), Skripsi Hukum, Shania Aprilia, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2021. Skripsi ini berfokus pada masalah *Fintech* P2P lending di Indonesia, khususnya *Fintech* P2P *lending ilegal*, yang memiliki banyak masalah dan kasus seperti tindakan intimidatif, mengakses kontak, dan membobol data pribadi. Selain itu, penelitian ini juga mencoba menganalisis upaya untuk meningkatkan regulasi yang harus dilakukan, yaitu dengan mengesahkan Undang-undang.
2. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Transaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman Online[[15]](#footnote-15), Ahmad Maliandi Hamaris, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022. Skripsi ini meneliti perlindungan hukum bagi nasabah dan peraturan penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis internet. Ini menunjukkan bahwa POJK Nomor 77 Tahun 2016 telah mengatur penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis internet. Namun, Peraturan ini tidak menyediakan perlindungan hukum yang lengkap bagi nasabah. Salah satu faktor penghambat adalah adanya keluhan masyarakat, yang dapat diatasi dengan keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi nasabah.
3. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Data Pribadinya Dijual Di Aplikasi *Fintech*[[16]](#footnote-16), Andriyana, Tina, Skripsi Hukum, Universitas Jember, 2020 Pembahasan skripsi ini membahas bagaimana hukum positif Indonesia dapat mengakomodasi jual beli data pribadi konsumen fintech. Jika pengaduan tidak berhasil diproses, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tanggung jawab pelaku usaha *fintech* terhadap konsumen fintech. Sengketa antara mereka dapat diselesaikan melalui pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika atau badan pengaduan konsumen pada aplikasi *fintech.* Jika tidak, sengketa dapat diselesaikan secara non-litigasi atau melalui pengadilan.

Perbedaan skripsi penulis mengenai Skripsi diatas adalah salah satunya skripsi tentang Permasalahan Teknologi Keuangan Illegal di Indonesia tidak secara khusus membahas hak-hak nasabah yang termasuk dalam asas pelanggaran dalam jasa keuangan online, meskipun ada beberapa *overlap* dalam konteks regualsi dan perlindungan konsumen. Selanjutnya di dalam penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Transaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman Online lebih fokus pada perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal aplikasi pinjaman yang dapat diakses secara online, sedangkan topik penelitian penulis "Kewenangan OJK dalam menangani hak nasabah terhadap pelanggaran jasa keuangan online" lebih menekankan pada kewenangan OJK dalam menangani pelanggaran Meskipun ada kesamaan dalam perlindungan hukum bagi nasabah, penelitian penulis ini tidak secara khusus mengidentifikasi hak-hak nasabah yang termasuk dalam asas pelanggaran dalam jasa keuangan online. Terakhir penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Data Pribadinya Dijual Di Aplikasi Fintech adalah Meskipun ada beberapa masalah yang sama terkait dengan perlindungan konsumen, penelitian penulis ini tidak secara khusus membahas masalah perlindungan konsumen. Sebaliknya, topik penelitian penulis berjudul "Kewenangan OJK dalam menangani hak nasabah terhadap pelanggaran jasa keuangan online" lebih berfokus pada kewenangan OJK dalam menangani hak nasabah secara keseluruhan terkait dengan pelanggaran jasa keuangan online.

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di pakai adalah penelitian kepustakaan jenis penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber data utama[[17]](#footnote-17). Dalam edisi keenam bukunya, Creswell dan Creswell menguraikan bahwa penelitian kepustakaan mencakup pemahaman yang mendalam tentang desain penelitian kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran[[18]](#footnote-18). Mereka menyoroti pentingnya mengintegrasikan berbagai metode penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian secara tepat dan menyeluruh.

Menurut Creswell dan Creswell, penelitian kepustakaan adalah tahap awal yang krusial dalam setiap proyek penelitian karena melibatkan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengakses, dan mengevaluasi literatur yang relevan dengan topik yang sedang diteliti[[19]](#footnote-19). Proses ini tidak hanya membantu peneliti memahami apa yang sudah diketahui tentang suatu topik, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada yang bisa menjadi fokus penelitian lebih lanjut[[20]](#footnote-20).

Menurut Ridley menambahkan bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya melibatkan pencarian dan pengumpulan data dari sumber yang ada, tetapi juga analisis kritis dan sintesis dari literatur tersebut[[21]](#footnote-21). Peneliti harus mampu mengidentifikasi tema, tren, dan perdebatan utama dalam literatur yang ada serta memberikan kontribusi baru melalui analisis mereka[[22]](#footnote-22). Ridley menekankan pentingnya keterampilan analitis dalam menilai kualitas dan relevansi sumber-sumber literatur, serta kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai perspektif untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian[[23]](#footnote-23). Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks teoritis dan metodologis dari literatur yang sedang dianalisis.

Menurut Neuman menekankan bahwa penelitian kepustakaan melibatkan tiga tahap utama pencarian literatur, penilaian literatur, dan analisis literatur[[24]](#footnote-24). Dalam tahap pencarian, peneliti harus mampu mengidentifikasi sumber yang paling relevan dan terpercaya. Ini sering kali melibatkan penggunaan database akademik, jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber lain yang kredibel[[25]](#footnote-25). Peneliti harus menggunakan teknik pencarian yang efektif, seperti penggunaan kata kunci yang tepat, untuk mengakses literatur yang relevan. Setelah literatur terkumpul, peneliti harus melakukan penilaian kritis terhadap kualitas dan kredibilitas setiap sumber[[26]](#footnote-26).

Dalam penelitian kepustakaan, penting untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dan pendekatan teoritis yang ada dalam literatur. Hal ini membantu peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang topik penelitian mereka. Selain itu, dengan menganalisis berbagai sumber literatur, peneliti dapat mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan dalam pengetahuan yang ada, yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut. Penelitian kepustakaan juga memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis dan teori yang ada, serta mengembangkan kerangka konseptual yang lebih kuat untuk penelitian mereka.

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam ini yaitu pendekatan normatif dalam hukum adalah pendekatan yang meneliti hukum sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia[[27]](#footnote-27). Pendekatan ini berfokus pada asas-asas, norma, kaidah, dan doktrin hukum yang bersumber dari undang-undang, keputusan pengadilan, perjanjian, dan ajaran para ahli. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),[[28]](#footnote-28) yaitu metode yang memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas. Pendekatan ini mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut, serta melihat adanya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum[[29]](#footnote-29).

### Sumber Data

Ada beberapa sumber data yang di gunakan dalam pembahasan Kewenangangan OJK dalam menangani hak nasabah terhadap pelanggaran pinjaman online, antara lain:

1. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang menjelaskan, menginterpretasikan, atau mengkritisi bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, makalah, dan artikel bahan hukum sekunder menjadi bahan hukum utama di penelitian ini[[30]](#footnote-30).
2. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan perjanjian[[31]](#footnote-31).
3. Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang bersifat membantu atau memudahkan dalam mencari atau mengakses bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks, dan abstrak yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Data penelitian dapat ditemukan melalui pencarian[[32]](#footnote-32).

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam pembahasan kewenangan otoritas jasa keuangan dalam menangani hak nasabah atas pelanggaran dalam jasa keuangan online dengan cara deksriptif naratif mencari literatur, mencari data secara online, mencari data secara offline, melakukan interview, menganalisis, dan menyusun dokumen berupa undang-undang, peraturan pemerintah, buku, jurnal, website, dan artikel[[33]](#footnote-33).

### Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah metode menganalisis, mengelolah dan menginterpresikan data yang di jadikan satu untuk sebuah penelitian dalam pembahasan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Hak Nasabah Atas Pelanggaran Dalam Jasa Keuangan Online, yaitu Metode analisis kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi[[34]](#footnote-34).

## Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan disusun secara sistematis dan berkesinambungan dalam pembahasan Kewenangangan OJK dalam menangani hak nasabah terhadap pelanggaran pinjaman online yang terdiri atas beberapa bagian yaitu

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab 1 merupakan pengembangan dari proposal yang menyajikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL**

Bab II menguraikan tentang norma hokum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat sesuai dengan variabel penelitian termuat dalam judul Kewenangangan OJK dalam menangani hak nasabah terhadap pelanggaran pinjaman online, dengan urutan penulisan pada Bab II sebagai berikut tinjauan tentang Kewenangan; Tinjauan tentang Otoritas Jasa Keuangan; Tinjauan tentang Pinjaman dan Tinjauan tentang Hak Nasabah.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan data hasil penelitian yang telah diolah, dianalisi dan ditafsirkan. Data penelitian akan tampak jelas bagaimana disusun sesuai urutan permasalahan dalam pembahasanya yang telah dikonstalasikan dengan tinjauan konseptual. Urutan penulisan pada Bab III sebagai berikut

1. Hak-hak nasabah yang termasuk dalam asas pelanggaran dalam jasa keuangan online
2. kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani hak nasabah terhadap pelanggaran jasa keuangan online.

**BAB IV PENUTUP**

Bab IV merupakan kristalisasi semua yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab rumusan masalah. Urutan penulisan pada Bab IV sebagai berikut

1. Simpulan
2. Saran

# BAB II

# TINJAUAN KONSEPSIONAL

## Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

### Definisi Kewenangan

Kewenangan sering dikaitkan dengan kekuasaan lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam sistem pemerintahan yang efektif, setiap lembaga memiliki kewenangan yang berbeda-beda berdasarkan fungsi dan tugas yang diberikan kepadanya[[35]](#footnote-35). Misalnya, lembaga eksekutif mengelola administrasi pemerintahan dan menjalankan kebijakan publik, sedangkan lembaga legislatif membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah.[[36]](#footnote-36) Di sisi lain, lembaga yudikatif melaksanakan program pemerintah dan berfungsi sebagai agen pelaksana kebijakan negara, tetapi hanya lembaga legislatif yang memiliki otoritas untuk menghasilkan undang-undang. Mereka berfungsi sebagai tempat di mana orang dapat membahas masalah politik yang signifikan.[[37]](#footnote-37)

Dalam lembaga peradilan, kewenangan sering dikaitkan dengan yurisdiksi, yaitu otoritas pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan mengeluarkan keputusan mengenai perkara. Yurisdiksi dapat umum maupun khusus, tergantung pada undang-undang yang berlaku. Dalam hukum perdata, kewenangan juga dapat berarti bahwa suatu lembaga atau individu memiliki wewenang untuk melakukan tindakan hukum seperti membuat perjanjian, melakukan transaksi bisnis, atau melakukan tindakan hukum lainnya.[[38]](#footnote-38) Selain itu, kewenangan juga dapat terlibat dalam proses penegakan hukum seperti penangkapan, penahanan, atau penyitaan aset. Dalam hal ini, kewenangan harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh melanggar hak-hak individu yang dilindungi oleh hukum.

Kewenangan dapat diartikan dengan umum atau khusus, untuk kewenangan khusus merujuk pada hak atau wewenang yang diberikan secara khusus untuk melakukan tindakan atau keputusan tertentu. Sementara itu, kewenangan umum merujuk pada hak atau wewenang yang dimiliki secara umum oleh suatu lembaga atau individu untuk melaksanakan tugasnya.[[39]](#footnote-39) Kewenangan umum termasuk menetapkan anggaran organisasi, membuat kebijakan, dan mengatur, dan mengawasi pelaksanaan program.[[40]](#footnote-40) Secara umum, kewenangan dikaitkan dengan membagikan tugas dan kewajiban antara unit kerja atau individu dalam organisasi. Setiap unit kerja atau individu memiliki kewenangan searah serta fungsi dan kewajibanya guna menggapai tujuan organisasi. Dengan kewenangan ini, seseorang atau unit kerja memiliki otoritas untuk mengambil keputusan, melakukan tindakan, atau mengontrol sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Namun, perlu diingat bahwa wewenang ini harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan dan prosedur. Individu atau unit kerja juga harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan tersebut.

Kewenangan biasanya terdapat dalam bentuk ketentuan undang-undang atau peraturan yang meregulasi pembagian dan penggunaan kewenangan. Tujuan aturan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan dilakukan di luar batas-batas yang ditetapkan. Oleh karena itu, kewenangan sangat vital dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pemerintahan, hukum, dan organisasi. Pengaturan kewenangan yang jelas dapat mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, dan mengkonfirmasikan bahwa setiap tindakan atau ketetapan yang dibuat berada dalam kerangka hukum yang berlaku.

### Jenis-Jenis Kewenangan

#### Berdasarkan Max Weber

Menurut Max Weber Kewenangan dibagi menjadi beberapa jenis yaitu Kewenangan Tradisional, Kewenangan Karismatik dan Kewenangan *Legal-Rasional[[41]](#footnote-41)*.

##### Kewenangan Tradisional.

Kewenangan tradisional didasarkan pada kepercayaan yang mapan dalam validitas adat istiadat dan tradisi yang telah berlangsung lama[[42]](#footnote-42). Kewenangan ini diterima karena adanya penghormatan terhadap tradisi dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi[[43]](#footnote-43). Dalam masyarakat yang menerapkan kewenangan tradisional, aturan dan norma sosial yang sudah ada sejak lama diikuti tanpa banyak pertanyaan. Kewenangan tradisional berakar pada adat dan kebiasaan yang telah ada sejak lama[[44]](#footnote-44). Tradisi ini diakui dan diterima secara luas oleh masyarakat karena sudah berlangsung lama dan dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan mereka[[45]](#footnote-45).

Otoritas sering kali diwariskan melalui garis keturunan[[46]](#footnote-46). Posisi kekuasaan seperti raja, kepala suku, atau pemimpin klan biasanya diberikan kepada anggota keluarga tertentu berdasarkan aturan pewarisan yang telah ditentukan oleh tradisi[[47]](#footnote-47). Sistem ini cenderung stabil dan berubah secara lambat karena adanya penghormatan yang mendalam terhadap adat dan kebiasaan[[48]](#footnote-48). Masyarakat cenderung menerima otoritas tanpa banyak pertanyaan karena sudah terbiasa dengan struktur tersebut[[49]](#footnote-49). Tradisi dan adat istiadat sering kali diperkuat melalui berbagai ritual dan simbol yang menegaskan kekuasaan dan otoritas pemimpin[[50]](#footnote-50). Misalnya, upacara penobatan raja atau kepala suku yang melibatkan berbagai ritual adat[[51]](#footnote-51).

##### Kewenangan kharismatik.

Jenis kewenangan ini adalah ketika seseorang memiliki sifat-sifat tertentu yang membuatnya dihormati dan diikuti oleh orang lain. Mereka yang memiliki sifat karismatik ini dapat menjadi pemimpin yang hebat dan memiliki dampak besar pada orang lain. Kepemimpinan yang didasarkan pada kekuatan kharismatik sering muncul dalam gerakan agama, politik, atau sosial di mana orang dianggap memiliki kekuatan gaib atau keberkahan yang layak untuk diikuti.[[52]](#footnote-52)

##### Kewenangan Rasino-Regal

Jenis kewenangan ini didasarkan pada undang-undang yang jelas. Kewenangan seseorang atau lembaga dalam situasi ini didasarkan pada aturan dan peraturan yang telah ditetapkan secara formal. Seorang pejabat pemerintah, misalnya, memiliki otoritas setelah menjabat sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dalam sistem pemerintahan dan lembaga formal lainnya, kewenangan legal-rasional ini seringkali menjadi dasar bagi struktur kekuasaan.[[53]](#footnote-53).

#### Berdasarkan Sifatnya

Kewenangan menurut sifatnya dibagi menjadi tiga yaitu bersifat terikat, bersifat fakultatif (pilihan), dan bersifat bebas.

1. Kewenangan Terikat. Kewenangan terikat terbatas oleh undang-undang, peraturan, atau kontrak yang mengikat, Kewenangan terikat biasanya terjadi dalam kontrak atau perjanjian antara dua pihak yang setuju untuk tunduk pada aturan yang ditetapkan dalam kontrak. Wewenang masing-masing pihak dibatasi oleh aturan yang ditetapkan dalam kontrak, dan mereka tidak dapat melanggarnya tanpa melanggarnya[[54]](#footnote-54).
2. Kewenangan Bebas. Kewenangan bebas memberikan individu atau entitas kebebasan untuk bertindak sesuai dengan kebijaksanaan atau keputusan mereka sendiri; mereka tidak terikat oleh undang-undang atau perjanjian tertentu, dan mereka memiliki kebebasan untuk membuat keputusan tanpa adanya hambatan yang mengikat. Dalam kenyataannya, ada banyak situasi di mana wewenang terikat dan wewenang bebas berlaku bersamaan. Sebagai contoh, seorang manajer di sebuah perusahaan mungkin memiliki wewenang bebas untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan, tetapi dia tetap terikat oleh aturan dan kebijaksanaan perusahaan**[[55]](#footnote-55)**.

##### Kewenangan Fakultatif. Kewenangan ini memberikan pilihan kepada pemegang kewenangan untuk menjalankannya atau tidak. Dalam konteks ini, pemegang kewenangan memiliki kebebasan untuk menentukan apakah akan menggunakan kewenangannya atau tidak, tanpa adanya paksaan. Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan untuk menggunakan kewenangan fakultatif haruslah didasarkan pada pertimbangan yang matang dan sesuai dengan kepentingan yang bersangkutan. Dengan demikian, penggunaan kewenangan fakultatif harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan dampak serta konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil[[56]](#footnote-56).

### Sumber-sumber Kewenangan

Sumber kewenangan pemerintah terdiri dari tiga jenis yaitu atribusi, delegasi, dan mandat[[57]](#footnote-57).

#### Atribusi

Atribusi merupakan salah satu jenis sumber kewenangan pemerintah yang didefinisikan sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang memberikan otoritas kepada lembaga dan pejabat pemerintah (UUD 1945) atau Undang-Undang. Dalam konteks ini, atribusi merupakan proses pemberian kewenangan pemerintahan diberikan kepada organ pemerintahan oleh pembuat undang-undang. Hal ini menegaskan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah berasal dari undang-undang yang berlaku[[58]](#footnote-58).

Secara lebih rinci, atribusi adalah cara pemberian kewenangan yang bersifat asli dan langsung dari peraturan perundang-undangan, bukan hasil dari pelimpahan atau mandat[[59]](#footnote-59). Misalnya, dalam pembuatan peraturan daerah (perda), kewenangan ini bisa diberikan langsung oleh UUD 1945 atau undang-undang lain tanpa perlu proses pelimpahan dari otoritas yang lebih tinggi[[60]](#footnote-60). Artinya, organ pemerintahan yang menerima atribusi memiliki tanggung jawab penuh atas kewenangan yang diberikan dan tidak dapat mengalihkannya, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi[[61]](#footnote-61).

#### Delegasi

Delegasi adalah mekanisme pelimpahan otoritas pemerintah yang berpindah dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya. Dalam konteks delegasi, terdapat perpindahan tanggung gugat dan tanggung jawab yang berpindah sepenuhnya untuk penerima delegasi. Hal ini menunjukkan bahwa organ pemerintahan yang menerima delegasi memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksanaan kewenangan yang diberikan padanya[[62]](#footnote-62).

Selain itu, delegasi memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan karena memungkinkan otoritas yang lebih tinggi untuk melimpahkan tugas kepada tingkat yang lebih rendah, yang mungkin lebih dekat dengan permasalahan yang ada[[63]](#footnote-63). Proses ini juga dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintahan terhadap kebutuhan masyarakat karena keputusan dapat diambil dengan lebih cepat dan tepat[[64]](#footnote-64).

Namun, delegasi memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa kewenangan yang dilimpahkan digunakan dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku[[65]](#footnote-65). Tanpa pengawasan yang efektif, ada risiko penyalahgunaan wewenang oleh penerima delegasi, yang dapat merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan[[66]](#footnote-66).

#### Mandat

Mandat proses di mana lembaga pemerintah mengizinkan lembaga lain untuk menjalankan kewenanganya atas namanya. Dalam konteks mandat, tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun otoritas dijalankan oleh organ lain, namun tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut tetap pada pemberi mandat[[67]](#footnote-67). Setiap jenis kewenangan ini memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda dan dapat mempengaruhi cara organisasi atau pejabat pemerintahan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Mandat bisa sangat berguna dalam pelaksanaan tugas-tugas rutin yang tidak memerlukan pengambilan keputusan yang kompleks. Dengan memberikan mandat, pemberi kewenangan dapat fokus pada tugas-tugas strategis dan penting, sementara tugas-tugas operasional dijalankan oleh organ yang menerima mandat[[68]](#footnote-68).

Namun, seperti halnya delegasi, mandat juga memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan[[69]](#footnote-69). Tanpa pengawasan yang baik, ada risiko bahwa kewenangan yang diberikan melalui mandat dapat disalahgunakan atau tidak dijalankan dengan efektif[[70]](#footnote-70).

## Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan

### Sejarah Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang memiliki fungsi penting dalam mengatur dan mengawasi sistem untuk seluruh aktivitas dalam industri jasa keuangan di Indonesia yang memiliki visi-visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga yang dapat diandalkan untuk mengawasi industri jasa keuangan, menjaga kepentingan masyarakat dan nasabah, dan mampu membangun sektor ini menjadi pilar ekonomi kompetitif di tingkat nasional di tingkat dunia dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan umum[[71]](#footnote-71). Melalui visi tersebut, OJK bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi para investor, dan mempromosikan inklusi keuangan sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan layanan keuangan. Selain itu, OJK memiliki peran juga dalam meningkatkan keterbukaan dan kewajiban dalam industri keuangan serta memastikan bahwa semua institusi keuangan beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan[[72]](#footnote-72). Dengan demikian, OJK berperan sebagai penjaga keamanan dan kesehatan sistem keuangan Indonesia, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu OJK memiliki beberapa misi yaitu

1. **Menjamin bahwa operasi di industri jasa keuangan dilakukan secara konsisten, adil, jelas, dan akuntabel.; Sebagai contoh, OJK telah menjalankan pengawasan terhadap perusahaan *fintech peer to peer lending* untuk memastikan bahwa mereka memberikan pinjaman yang adil dan transparan kepada masyarakat. Selain itu, OJK juga telah menetapkan aturan dan regulasi yang ketat untuk melindungi konsumen dari risiko keuangan yang tidak diinginkan**[[73]](#footnote-73)**.**
2. **Menciptakan sistem keuangan yang berkembang secara konsisten dan berkelanjutan; OJK memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan selain menjaga stabilitas sistem keuangan, sektor jasa keuangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang konsisten.. Sebagai contoh, OJK telah mengeluarkan** Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 **peraturan yang mengharuskan perusahaan *fintech peer to peer* lending untuk memberikan informasi yang jelas tentang suku bunga dan biaya terkait pinjaman kepada para peminjam. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik penipuan dan melindungi nasabah dari tanggung jawab keuangan yang tidak terduga**[[74]](#footnote-74)**.**
3. **Menjaga kepentingan pelanggan dan masyarakat. Dengan undang-undang ini, para pelaku usaha *fintech peer to peer lending* diharapkan memiliki kemampuan untuk memberikan layanan yang transparan dan bertanggung jawab kepada konsumen. Hal ini akan meningkatkan keyakinan publik terhadap sektor jasa keuangan dan mengurangi risiko terjadinya krisis finansial yang dapat merugikan perekonomian secara keseluruhan.**[[75]](#footnote-75)

Otoritas Jasa Keuangan mulai berkembang dan terbentuk pada tahun pada tanggal 16 Juli 2012 ketika lembaga ini resmi berdiri berdasarkan Undang-undang yang mengatur pendiriannya. Sejak saat itu, OJK terus mengalami perkembangan yang signifikan dalam melaksanakan tugasnya[[76]](#footnote-76), seperti mengawasi perusahaan asuransi, bank, dan lembaga keuangan lainnya untuk memastikan mereka mematuhi peraturan yang ada. Sebagai contoh, OJK memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan dalam menjalankan bisnis mereka, seperti denda atau pencabutan izin operasional.

Otoritas Jasa Keuangan membentuk Tim transisi Tahap I Pada tanggal 15 Agustus 2012, yang bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisioner OJK dalam menjalankan tanggung jawab mereka.. Hal ini menunjukkan komitmen OJK dalam memastikan kelancaran proses transisi menuju kelembagaan yang lebih mandiri Contohnya, OJK memberikan sanksi kepada sejumlah perusahaan asuransi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan regulasi. Salah satu perusahaan asuransi besar di Indonesia dikenai denda karena tidak memenuhi persyaratan modal minimum yang ditetapkan yaitu **CV Duta Asuransi Indonesia (CV DAI) yang telah menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi tanpa izin sebagaimana diatur pada Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.[[77]](#footnote-77)** Langkah ini merupakan upaya OJK untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Perkembangan berikutnya terjadi pada tanggal 31 Desember 2012, OJK mulai mengawasi pasar modal dan sektor keuangan non-bank. Hal ini menandai langkah awal OJK dalam melakukan tugas pengawasan dalam industri keuangan. OJK terus melakukan pemantauan terhadap institusi keuangan di Indonesia yang beroperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perlindungan bagi konsumen. Kerjasama antara OJK dengan lembaga terkait juga sangat penting untuk mempertahankan kestabilitas sistem keuangan negara dengan adanya regulasi yang ketat, diharapkan sektor keuangan dapat terus mengalami pertumbuhan yang sehat di Indonesia dan berkelanjutan. Misalnya, OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan bank Indonesia untuk menghindari risiko sistemik bagi industri keuangan. Selain itu, OJK juga melakukan kerjasama dengan Kementerian Keuangan dalam memastikan perlindungan bagi investor pasar modal yang berpartisipasi dalam pasar keuangan.

Upaya untuk menguatkan fungsi OJK dalam mengatur dan mengawasi perbankan, pada tanggal 18 Maret 2013, lembaga ini membentuk Tim Transisi OJK Tahap II. Salah satu tugas tim ini adalah membantu Dewan Komisioner OJK dalam pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI).[[78]](#footnote-78) Langkah ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperluas cakupan pengawasannya di sektor keuangan. Tim Transisi OJK Tahap II juga bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pengorganisasian dan pengawasan perbankan yang efisien dan efektif setelah pengalihan fungsi dari Bank Indonesia. Dengan adanya kerjasama antara OJK dan Kementerian Keuangan, diharapkan investor pasar modal dapat merasa lebih aman dan terlindungi saat berpartisipasi dalam pasar keuangan. Langkah-langkah ini merupakan langkah proaktif OJK dalam menghadapi tantangan dan risiko di sektor keuangan, serta menunjukkan komitmen mereka dalam meningkatkan stabilitas dan integritas pasar keuangan di Indonesia.

Tonggak sejarah OJK dimulai tanggal 13 Desember 2013, dengan sepenuhnya mengambil tanggung jawabnya untuk mengawasi kinerja perbankan[[79]](#footnote-79). Hal ini menegaskan kemandirian OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasan di sektor perbankan. Pada saat itu, OJK berhasil mengawasi dan mengatur kinerja perbankan secara mandiri tanpa gangguan dari pihak lain, sehingga menciptakan kepercayaan dan keamanan bagi para investor. Ini merupakan contoh nyata bagaimana langkah-langkah proaktif OJK telah berhasil memperkuat pasar keuangan Indonesia dan meningkatkan integritasnya.

Perkembangan yang pesat di sektor keuangan, Sebelum berdirinya OJK, sistem keuangan di Indonesia diawasi oleh beberapa lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, Bapepam-LK, dan Bank Indonesia. Pada 31 Desember 2012, OJK beralih secara resmi dari Bapepam-LK dan Kementerian Keuangan untuk mengawasi industri keuangan non-bank dan pasar modal. Fungsi Bapepam-LK juga digantikan oleh OJK untuk mengontrol dan memantau lembaga keuangan dan pasar modal, dan juga menggantikan fungsi Bank Indonesia untuk mengawasi sistem keuangan. OJK terus melakukan pembaruan dalam melaksanakan tugasnya[[80]](#footnote-80). Pada tanggal 1 Januari 2015, OJK mulai memperluas pengawasannya ke sektor nonbank, seperti Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Langkah ini merupakan bukti nyata komitmen OJK dalam memastikan semua Sektor jasa keuangan harus teratur dan adil.

Sejarah OJK menunjukkan perjalanan yang cukup panjang dalam membangun lembaga pengawas keuangan yang mandiri dan profesional. Melalui berbagai tahapan dan perubahan yang dilaluinya, OJK terus berkomitmen untuk memastikan sektor keuangan stabil dan aman untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. OJK juga terus melakukan inovasi dalam menghadapi dinamika perubahan di sektor keuangan. Dengan bantuan sumber daya manusia berkualitas serta berpengalaman, OJK siap menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi pengawas keuangan yang bertanggung jawab.

Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, OJK terus berupaya untuk memberikan data yang mudah dipahami dan jelas kepada publik mengenai perannya dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya peran OJK dalam menciptakan lingkungan keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

OJK bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan setiap aktivitas yang terjadi di industri jasa keuangan. untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan adanya OJK, sektor jasa keuangan diharapkan memiliki kemampuan untuk beroperasi dengan lebih transparan, adil, dan aman bagi para pemangku kepentingan[[81]](#footnote-81). Dalam sejarahnya, krisis moneter Indonesia tahun 1990an mendorong pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). yang mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat dan perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk membentuk institusi yang mempunyai otoritas untuk mengawasi industri jasa keuangan dengan lebih baik agar krisis serupa tidak terulang kembali di masa depan[[82]](#footnote-82). Dengan demikian, peran OJK sangatlah vital dalam menciptakan stabilitas dan keamanan di sektor jasa keuangan, serta memastikan keberlangsungan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. OJK juga melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem ekonomi Indonesia.

OJK didirikan untuk mengambil peran Bapepam-LK dalam mengatur dan mengawasi pasar modal, lembaga keuangan, dan Bank Indonesia[[83]](#footnote-83). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia[[84]](#footnote-84).

### Tugas dan Wewenang OJK

OJK memiliki tugas dan wewenang yang sangat penting bagi kelancaran ekonomi indonesia sesuai Undang-undang Otoritas jasa keuangan adalahMeskipun demikian, pasal 6 UU No 21 tahun 2011 menetapkan bahwa tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Berdasarkan buku saku OJK, wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut::

1. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:
2. Perizinan untuk mendirikan bank dan membuka kantornya; anggaran dasar; rencana kerja; kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia; merger, konsolidasi, dan akuisisi; dan pembatalan izin usaha;
3. Operasi bank termasuk sumber dana, penyediaan dana, hibridasi, dan bisnis jasa.;
4. Peraturan dan pengawasan yang berkaitan dengan kesehatan bank, termasuk likuiditas dan rentabilitas, solvabilitaskualitas aset, rasio kecukupan modalminimum, maksimum jumlah kredit yang dapat diberikan, rasio pinjaman terhadasimpanan dan pencadangan banklaporan bank yang terkait dengankesehatan dan kinerja bank; sisteminformasi debitur; pengujian kredit(credit testing); dan standar akuntansi bank;
5. Peraturan dan pengawasan yang berkaitan dengan elemen kehati-hatian bank mencakup manajemen risiko; tata kelola; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan pemeriksaan bank..
6. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi :
7. Peraturan dan keputusan OJK dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri;
8. Mengatur pengawasan di industri jasa keuangan;
9. Membuat kebijakan untuk melaksanakan tugas OJK;
10. Menetapkan standar untuk prosedur penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
11. Menentukan prosedur untuk menunjuk pengelola statuter lembaga jasa keuangan;
12. Menentukan struktur dan infrastruktur organisasi, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban;
13. Mengatur prosedur sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
14. Memberikan dan/atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, pernyataan pendaftaran yang efektif, surat tanda terdaftar, persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau keputusan pembubaran, dan ketentuan lainnya..

Tugas-tugas ini dijalankan sesuai dengan UU No 21 tahun 2011 guna mengembangkan sistem keuangan yang kuat, transparan, dan berkualitas serta melindungi konsumen jasa keuangan di Indonesia. Selain itu, OJK juga bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengendalikan risiko-risiko yang ada di sektor keuangan[[85]](#footnote-85). Hal ini dilakukan melalui pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan. OJK juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan guna memastikan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku tidak hanya itu OJK juga memiliki tugas untuk menerbitkan informasi dan statistik terkait dengan pasar modal dan industri keuangan[[86]](#footnote-86). Hal ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan memudahkan akses informasi bagi para pelaku pasar modal dan investor. OJK juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pelaku pasar modal dan investor melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Semua tugas ini dilakukan sesuai dengan UU No 21 tahun 2011 guna mengembangkan sistem keuangan yang kuat, transparan, dan berkualitas serta melindungi konsumen jasa keuangan di Indonesia[[87]](#footnote-87).

Otoritas Jasa Keuangan juga bisa melindungi konsumen atau nasabah dari pelaku pinjol entah itu illegal dan legal dengan memberikan regulasi yang ketat terhadap kegiatan pinjaman online. Otoritas Jasa Keuangan mengawasi dan memantau aktivitas pinjol untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku[[88]](#footnote-88). OJK juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan tindakan pencegahan terkait penggunaan layanan pinjol agar konsumen dapat melindungi diri mereka sendiri dari praktik pinjol yang merugikan[[89]](#footnote-89). Dengan adanya tanggung jawab OJK untuk melindungi konsumen, diharapkan pasar pinjol dapat menjadi lebih aman dan terpercaya bagi masyarakat.

## Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online

### Definisi Pinjaman Online

Pinjaman online, juga disebut pinjaman *peer-to-peer (P2P)*, adalah bentuk pinjaman yang diberikan dengan cara online melalui platform atau aplikasi digital tertentu[[90]](#footnote-90). Pinjaman ini tidak melibatkan institusi keuangan tradisional seperti bank atau organisasi lainnya yang memberi pinjaman. Dalam pinjaman online, peminjam dapat mengajukan pinjaman secara online dan mendapatkan dana dari para pemberi pinjaman yang terdaftar di platform tersebut[[91]](#footnote-91).

Definisi pinjaman online menurut para ahli dan lembaga terkait menunjukkan bahwa pinjaman online adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan debitur dan kreditur secara online. *Fintech*, atau *financial technology*, menjadi landasan utama dalam pengembangan pinjaman online ini. Berbagai definisi *fintech* yang disampaikan oleh para ahli dan lembaga, seperti *Financial Stability Board* (*FSB*), menekankan pada inovasi dalam bidang layanan keuangan yang dapat menghasilkan model perusahaan, aplikasi, proses, atau produk digunakan yang berdampak material yang berkaitan dengan menyediakan layanan keuangan[[92]](#footnote-92).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia juga memberikan definisi yang mengatur tentang pengoperasian layanan finansial yang menghubungkan pemberian pinjaman kepada individu yang menerima pinjaman secara langsung melalui sistem online. Pernyataan ini juga menekankan bahwa *fintech* dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan, stabilitas moneter, efisien, lancar, aman, dan diandalkan sistem pembayaran[[93]](#footnote-93).

Konteks pinjaman online, definisi dari Warta Ekonomi dan Julo menegaskan bahwa keseluruhan transaksi pinjaman online terjadi secara daring atau online. Pinjaman online juga dijelaskan sebagai bantuan keuangan yang diberikan oleh institusi keuangan melalui jaringan[[94]](#footnote-94).

Salah satu keuntungan utama dari pinjaman online adalah kemudahan akses yang ditawarkannya[[95]](#footnote-95). Proses pengajuan pinjaman dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet, sehingga sangat memudahkan pengguna[[96]](#footnote-96). Hal ini berbeda dengan proses pinjaman tradisional yang seringkali memerlukan waktu lebih lama dan prosedur yang lebih kompleks[[97]](#footnote-97). Selain itu, pinjaman online sering kali menawarkan fleksibilitas dalam jumlah pinjaman dan jangka waktu pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peminjam[[98]](#footnote-98).

Namun, kemudahan ini juga disertai dengan tantangan tersendiri. Misalnya, risiko keamanan data pribadi yang diunggah ke platform pinjaman online[[99]](#footnote-99). Meskipun banyak platform yang menerapkan sistem keamanan yang ketat, potensi kebocoran data tetap ada[[100]](#footnote-100). Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk memilih platform yang terpercaya dan sudah terdaftar di OJK[[101]](#footnote-101). Pengguna juga harus waspada terhadap tanda-tanda penipuan dan memastikan bahwa mereka memahami syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum mengajukan pinjaman[[102]](#footnote-102).

Selain itu, suku bunga yang dikenakan pada pinjaman online sering kali lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman dari institusi keuangan tradisional[[103]](#footnote-103). Ini dikarenakan tingginya risiko yang dihadapi oleh pemberi pinjaman, mengingat pinjaman online biasanya tidak memerlukan jaminan atau agunan dari peminjam[[104]](#footnote-104). Suku bunga yang tinggi dapat menjadi beban bagi peminjam jika tidak dikelola dengan baik[[105]](#footnote-105).

Pinjaman online juga sering kali menjadi pilihan bagi mereka yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional, seperti individu dengan kredit macet atau yang tinggal di daerah terpencil[[106]](#footnote-106). Dengan demikian, pinjaman online dapat menjadi solusi inklusi keuangan yang membantu lebih banyak orang mendapatkan akses ke layanan keuangan[[107]](#footnote-107). Ini memungkinkan lebih banyak orang untuk mendapatkan dana yang mereka butuhkan untuk keperluan pribadi atau bisnis mereka[[108]](#footnote-108).

Secara keseluruhan, meskipun pinjaman online menawarkan banyak keuntungan, penting untuk selalu berhati-hati dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan melalui platform yang aman dan terpercaya. Pinjaman online dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan di seluruh Indonesia jika ada peraturan yang tepat dan instruksi yang tepat.

Mempertimbangkan berbagai definisi, dapat disimpulkan bahwa pinjaman online merupakan bagian dari kemajuan *fintech*, yang memungkinkan akses ke layanan keuangan yang lebih mudah dan cepat. Meskipun pinjaman online mudah diakses, peraturan dan pengawasan yang ketat perlu diterapkan untuk memastikan bahwa pinjaman online tidak hanya membawa keuntungan bagi masyarakat tetapi juga membawa risiko yang merugikan. Dengan memahami definisi dan fitur pinjaman online, diharapkan dapat meningkatkan pengaturan dan penggunaan layanan ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan konsisten.

### Jenis-Jenis Pinjaman Online

Pinjaman online adalah salah satu dari bentuk layanan finansial yang semakin populer di era teknologi saat ini. Namun, perlu diingat bahwa jenis pinjaman online dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu pinjaman online legal dan pinjaman online illegal[[109]](#footnote-109).

### Pinjaman Online *Legal*

Pinjaman online *legal* merujuk kepada layanan pinjaman yang terdaftar dan dipantau oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), institusi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengawasi organisasi keuangan di Indonesia. Keberadaan regulasi dan pengawasan dari OJK memastikan bahwa pinjaman online *legal* beroperasi sesuai dengan standar yang telah diputuskan dan juga melindungi konsumen.[[110]](#footnote-110) Memastikan legalitas pinjaman online salah satu caranya yakni dengan memeriksa keberadaan aplikasi pinjaman online tersebut di Google Playstore. Google Playstore tidak akan memasukkan aplikasi yang legalitasnya tidak jelas, sehingga keberadaan aplikasi pinjaman online di platform tersebut dapat menjadi indikator keabsahan layanan pinjaman tersebut.[[111]](#footnote-111)

Ciri-ciri pinjaman online legal antara lain adalah terdaftar dan diawasi oleh OJK, memiliki izin resmi, dan memberikan informasi yang transparan mengenai suku bunga, biaya, serta syarat dan ketentuan pinjaman[[112]](#footnote-112). Selain itu, pinjaman online legal biasanya memiliki prosedur yang jelas dan transparan dalam proses pengajuan hingga pencairan dana[[113]](#footnote-113). Mereka juga memiliki layanan pelanggan yang responsif untuk menangani keluhan dan pertanyaan nasabah[[114]](#footnote-114).

Proses pengajuan pinjaman online legal biasanya cukup mudah dan cepat[[115]](#footnote-115). Nasabah hanya perlu mengisi formulir aplikasi yang disediakan oleh platform pinjaman online dan melampirkan dokumen yang diperlukan seperti KTP dan slip gaji[[116]](#footnote-116). Setelah itu, pihak penyedia pinjaman akan melakukan verifikasi data dan jika disetujui, dana pinjaman akan segera dicairkan ke rekening nasabah[[117]](#footnote-117).

Pinjaman online legal juga menyediakan berbagai pilihan tenor atau jangka waktu pinjaman yang dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabah[[118]](#footnote-118). Nasabah dapat memilih tenor yang pendek, misalnya satu bulan, atau tenor yang lebih panjang hingga beberapa tahun[[119]](#footnote-119). Hal ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam mengatur pembayaran cicilan sesuai dengan kemampuan finansial mereka[[120]](#footnote-120).

Salah satu keuntungan menggunakan pinjaman online legal adalah adanya keamanan hukum dan perlindungan konsumen yang lebih baik. Penyedia pinjaman online legal yang diawasi oleh OJK harus mematuhi peraturan yang ketat dan menjaga data pribadi nasabah aman[[121]](#footnote-121). Selain itu, suku bunga dan biaya lainnya juga harus transparan dan tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan oleh OJK[[122]](#footnote-122).

Namun, meskipun terdapat banyak manfaat, nasabah tetap harus berhati-hati dan memastikan bahwa mereka memahami syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum mengambil pinjaman[[123]](#footnote-123). Membaca ulasan dan mencari informasi sebanyak mungkin tentang penyedia pinjaman online juga sangat disarankan untuk menghindari risiko penipuan[[124]](#footnote-124).

#### Pinjaman Online Illegal

Pinjaman online illegal tidak terdaftar atau dimonitor oleh lembaga pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini berarti bahwa layanan pinjaman online illegal tidak memenuhi standar dan regulasi yang telah ditetapkan, serta dapat menimbulkan risiko bagi para konsumen yang menggunakannya[[125]](#footnote-125). Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk waspada terhadap penawaran pinjaman online yang tidak memiliki legalitas yang jelas . Seseorang bisa mengidentifikasi pinjaman online yang illegal dengan cara apabila aplikasi pinjaman online yang di temukan di platform online dan tidak terdaftar oleh OJK, ada kemungkinan besar bahwa layanan tersebut illegal tidak hanya itu, jika aplikasi tersebut menawarkan suku bunga yang sangat tinggi atau mengumpulkan informasi pribadi secara tidak sah, hal ini dapat menjadi indikasi bahwa layanan tersebut tidak memiliki legalitas yang jelas[[126]](#footnote-126).

Pinjaman online illegal sering kali beroperasi dengan cara yang sangat merugikan konsumen. Mereka cenderung menerapkan suku bunga yang sangat tinggi dan memberlakukan biaya-biaya tambahan yang tidak transparan[[127]](#footnote-127). Selain itu, metode penagihan yang digunakan oleh penyedia pinjaman illegal sering kali tidak etis dan bahkan bisa melibatkan intimidasi atau ancaman terhadap nasabah[[128]](#footnote-128).

Keberadaan pinjaman online illegal ini tidak hanya merugikan konsumen secara finansial, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius[[129]](#footnote-129). Banyak nasabah yang merasa tertekan dan stres karena cara-cara penagihan yang tidak manusiawi dan ancaman yang diterima dari penyedia pinjaman[[130]](#footnote-130). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya regulasi dan pengawasan yang ketat untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan tersebut[[131]](#footnote-131).

Untuk menghindari jebakan pinjaman online illegal, konsumen harus selalu memastikan bahwa mereka menggunakan layanan dari penyedia pinjaman yang terdaftar dan diawasi oleh OJK[[132]](#footnote-132). Selain itu, penting untuk selalu membaca syarat dan ketentuan dengan teliti serta memahami semua biaya yang terkait dengan pinjaman[[133]](#footnote-133). Konsumen juga harus skeptis terhadap penawaran pinjaman yang terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, karena ini bisa menjadi indikasi penipuan[[134]](#footnote-134).

Pemerintah dan OJK telah mengambil berbagai tindakan untuk melawan pinjaman ilegal melalui internet. Salah satunya adalah dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pinjaman online illegal dan cara mengidentifikasi penyedia pinjaman yang legal[[135]](#footnote-135). Selain itu, OJK juga bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk menindak tegas penyedia pinjaman online illegal[[136]](#footnote-136).

### Pelanggaran Pinjaman Online

Pelanggaran pinjaman online memiliki berbeagai macam variasi tergantung pada kebijakan dan praktik masing-masing penyedia layanan. Penyalahgunaan data pribadi pelanggan, penagihan yang tidak wajar atau kasar, suku bunga yang tidak memenuhi persyaratan, dan penipuan selama pengajuan pinjaman adalah beberapa bentuk pelanggaran yang paling umum[[137]](#footnote-137). Ketentuan yang dimasukkan ke dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) melanggar pelanggaran ini. Misalnya, Pasal 32 ayat (2) *juncto* Pasal 48 ayat (2) UU ITE mengatur pelanggaran data pribadi dan Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) UU ITE mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik. Sementara itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) melindungi konsumen juga. Ini berlaku untuk pihak pinjaman online yang dikenal sebagai pinjol ilegal. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016, yang mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (POJK), menetapkan sanksi administratif jika melanggar ketentuan ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi penyedia layanan pinjaman online untuk mematuhi peraturan yang berlaku untuk melindungi kepentingan dan hak pelanggan serta menjaga kredibilitas industri pinjaman online[[138]](#footnote-138).

## Tinjauan Umum Tentang Hak Nasabah

### Definisi Hak Nasabah

Dalam industri perbankan dan asuransi, hak nasabah sangat penting. Selama menggunakan layanan pinjaman online, konsumen memiliki hak-hak tertentu[[139]](#footnote-139). Ini termasuk hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang barang serta pelayanan yang ditawarkan, hak untuk melindungi data pribadi mereka, hak untuk dilindungi dari penagihan yang tidak adil atau penggunaan, dan hak untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan tanggapan yang memadai[[140]](#footnote-140).

Para ahli di bidang keuangan telah mengemukakan berbagai Menurut Kasmir, pelanggan adalah orang yang membeli atau menggunakan barang yang dijual atau ditawarkan oleh bank. Artinya, nasabah memiliki hak untuk memperoleh produk-produk perbankan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya[[141]](#footnote-141).

Saladin juga menyatakan bahwa nasabah adalah konsumen-konsumen yang menjadi penyedia dana bagi bank. Dalam hal ini, nasabah berhak mendapatkan pelayanan yang baik serta perlindungan terhadap dana yang disimpan atau diinvestasikan di bank.[[142]](#footnote-142)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 32 Ayat 1, nasabah adalah perseorangan atau badan yang menggunakan ataupun menerima fasilitas bank, baik dalam bentuk produk maupun jasa. OJK juga menegaskan bahwa Nasabah berhak atas perlindungan dan keamanan dalam melakukan transaksi perbankan. Keseluruhan berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa hak nasabah mencakup hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, perlindungan terhadap dana, informasi yang jelas, dan imbalan atas simpanan yang telah dipercayakan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keamanan dan perlindungan konsumen Dalam melakukan suatu kegiatan yang terkait perbankan dan asuransi karena lembaga keuangan harus memastikan bahwa hak-hak nasabah selalu dijunjung tinggi dan dilindungi dengan baik.

### Dasar Hukum Hak Nasabah

#### Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK)

Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK) memberikan hak-hak yang penting bagi nasabah pinjaman online (Pinjol) sesuai dengan peraturan yang terkait. Tujuan UUOJK adalah untuk menjaga kepentingan masyarakat dan konsumen dalam operasi usaha di industri jasa keuangan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya melindungi nasabah Pinjol saat mereka melakukan transaksi keuangan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengontrol berbagai aspek sektor jasa keuangan di Indonesia. Salah satu fokus utama Undang-undang ini adalah perlindungan kepentingan konsumen. Pasal 4 menegaskan bahwa OJK bertujuan untuk menyelenggarakan melindungi masyarakat dan konsumen dengan cara yang teratur, adil, jelas, dan akuntabel. Hal ini menunjukkan komitmen OJK dalam memastikan bahwa aktivitas keuangan dilakukan berdasarkan prinsip yang mengutamakan keadilan dan kepentingan konsumen[[143]](#footnote-143).

Ketentuan pasal 6 juga mengatur perlindungan masyarakat dan konsumen, termasuk melalui kegiatan pencegahan, pendidikan, sosialisasi, dan perlindungan hukum jika dibutuhkan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan konsumen dan masyarakat dapat lebih sadar akan hak-hak mereka bertransaksi dalam industri jasa keuangan., serta mendapatkan perlindungan yang layak dari pihak yang berwenang. Selain itu, Pasal 7 menetapkan standar etika OJK dan tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data, bersama dengan sanksi untuk pelanggaran. Hal ini menunjukkan keseriusan OJK dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dan menjaga integritas serta keamanan data konsumen.

Ketentuan pasal 11 memberikan otoritas khusus untuk melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai di OJK. Dengan adanya wewenang khusus ini, diharapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor jasa keuangan dapat dilakukan secara efektif dan profesional. Sementara itu, Pasal 12 menetapkan sanksi pidana untuk pelanggaran UU OJK dan untuk mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat otoritas OJK. Hal ini menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap undang-undang ini akan dikenai sanksi yang tegas, sehingga diharapkan dapat mendorong pihak-pihak terkait untuk mematuhi regulasi dengan sungguh-sungguh.

Terakhir, Pasal 13 menetapkan anggota Dewan dan fungsi, tugas, dan wewenang OJK untuk mengatur dan memantau operasi jasa keuangan mulai tanggal 31 Desember 2012. Hal ini menunjukkan bahwa OJK telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan tugasnya dalam pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan sejak tanggal tersebut. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan di Indonesia. Melalui regulasi ini, diharapkan transparansi, keadilan, dan keamanan dalam aktivitas keuangan dapat terus terjaga, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan keuangan yang berkualitas dan terpercaya.

#### Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah regulasi yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi konsumen di Indonesia. Ketentuan ini memiliki beberapa pasal yang secara khusus mengatur perlindungan nasabah, yang meliputi definisi konsumen, pelaku usaha, serta larangan untuk pelaku bisnis dalam memberi pelayanan.

Ketentuan pasal 1 UUPK memberikan definisi mengenai perlindungan konsumen, konsumen, dan orang yang mempunyai usaha. Perlindungan konsumen dijelaskan sebagai upaya untuk menegaskan kepastian hukum perlindungan konsumen. Sementara itu, konsumen diartikan sebagai semua individu yang menggunakan produk dan jasa yang ada di publik, baik guna kepentingan individu, keluarga, individu lain, dan alam semesta secara keseluruhan, bukan untuk dijual. Pelaku usaha dijelaskan sebagai semua individu atau kelompok, baik entitas hukum maupun non-hukum, yang mengambil tindakan dalam batas-batas hukum Negara Republik Indonesia, secara individu ataupun kolektif berdasarkan perjanjian, untuk menjalankan aktivitas bisnis di segala sektor ekonomi.

Ketentuan pasal 18 Ayat (1) UUPK menegaskan larangan bagi bisnis untuk menyediakan barang dan/atau jasa. Dilarang untuk pelaku usaha untuk memasukkan klausula baku ke dalam dokumen dan/atau perjanjian apabila beberapa hal tertentu terjadi. Hal-hal yang dilarang tersebut antara lain adalah perpindahan tanggung jawab pelaku usaha, penolakan pemberian kembali barang atau uang, memberi pelaku usaha kuasa dari konsumen untuk bertindak secara individu yang mempunyai kaitan dengan barang yang dibeli melalui angsuran, serta pengaturan mengenai bukti bahwa konsumen yang membeli barang atau jasa yang dibeli oleh tidak lagi berguna.

Adanya regulasi ini untuk melindungi Nasbah dan juga diharapkan sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh orang-orang yang terlibat dalam bisnis Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai UUPK dan implementasinya di berbagai sektor ekonomi menjadi sangat penting guna menjamin perlindungan yang optimal bagi konsumen, termasuk nasabah di Indonesia.

#### Undang-undang No. 11 Tahun 2008 *juncto* UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 *juncto* UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga memiliki kaitan dengan nasabah Pinjol. Kontrak elektronik antara debitur dan kreditur merupakan hal yang penting dalam transaksi Pinjol. Perjanjian digital diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE. Selain itu, pelanggaran terhadap data pribadi nasabah merupakan pelanggaran hukum serius yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (2) *juncto* Pasal 48 ayat (2) UU ITE. Menghina dan merusak nama baik juga dapat hukum pidana sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam menangani hak nasabah terkait dengan transaksi elektronik dan penggunaan teknologi informasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan kewenangan untuk menangani. Ketentuan Pasal 25A memberikan kewenangan kepada OJK untuk memeriksa laporan atau keterangan terkait dengan tindak melanggar hukum di sektor Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Pasal 28E ayat (2) juga mengizinkan OJK untuk memeriksa individu atau kelompok yang diduga melakukan pelanggaran dalam bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Ketentuan pasal 28F juga memberikan kewenangan kepada OJK untuk memeriksa alat dan metode yang terkait dengan aktivitas teknologi informasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan di bidang tersebut. Kemudian, Pasal 28G ayat (1) memberi OJK wewenang untuk melakukan penggeledahan di lokasi tertentu diduga melakukan pelanggaran dalam bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Terakhir, Pasal 28J ayat (2) memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan penyegelan dan penyitaan sarana dan alat teknologi informasi yang diduga digunakan dengan ikhtikad yang tidak baik Dengan adanya kewenangan tersebut, diharapkan OJK dapat melindungi hak nasabah dan menindak tegas pelanggaran di bidang transaksi elektronik dan teknologi informasi.

Nasabah Pinjol yang memiliki perlindungan hukum terkait dengan transaksi keuangannya. Hal ini memberikan keamanan hukum kepada nasabah Pinjol saat mereka menjalankan aktivitas keuangan mereka. Diharapkan, dengan perlindungan hukum ini, nasabah Pinjol dapat melakukan transaksi secara aman dan nyaman tanpa mengalami penyalahgunaan data pribadi atau pelanggaran lainnya..

Adanya ketentuan hukum yang mengatur akan tetapi, masih ada banyak kasus pelanggaran data dan penyalahgunaan informasi pribadi di industri pinjaman online, yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum saja mungkin tidak cukup untuk memastikan transaksi keuangan yang aman dan nyaman bagi pelanggan Pinjol Sebagai contoh, misalkan seorang nasabah Pinjol melakukan pinjaman online dengan salah satu platform terkemuka. Meskipun ada hukum yang menjaga privasi dan proteksi data pribadi nasabah, ternyata platform tersebut mengalami kebocoran data yang menyebabkan informasi pribadi nasabah tersebar luas. Akibatnya, nasabah menjadi rentan terhadap pencurian identitas dan penipuan. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum saja tidak cukup untuk melindungi pelanggan Pinjol dari risiko kehilangan informasi pribadi mereka contoh kasusnya yaitu Pengguna pinjaman online AdaKami diduga bunuh diri setelah diteror oleh penagih utang. Kasus itu menyebar di media sosial. pada bulan Mei 2023 Selain perlindungan hukum, perlu ada langkah-langkah teknologi yang kuat untuk melindungi data pelanggan dan mencegah pelanggaran keamanan.

## Pengaduan Nasabah Bank Dugaan/Melanggar Pembuktian Kredit

Sebagai pengetahuan pernah ada pengaduan nasabah kredit kepada OJK yang merasa di rugikan oleh bank sehingga pengadu mengajukan gugatan kepada bank di Pengadilan Negeri Slawi pada 11 Agustus 2023 di Pengadilan Negeri Slawi dengan nomor putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Slw, Penggugat, melalui kuasa hukumnya, mengajukan "Pengaduan dan Mohon Perlindungan Hukum" kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tegal, dengan nomor referensi No. Ref: 081/DP-PPH/VIII/2023. Dalam surat tersebut, Penggugat meminta OJK menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan memohon perlindungan hukum terkait kasus ini.

Setelah berbagai tahapan persidangan, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat karena kurangnya bukti kuat, sehingga alat bukti yang diajukan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan. Selain itu, Majelis Hakim juga menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagai konsekuensi dari penolakan gugatan ini.

Dalam persidangan, turut Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi beberapa keberatan terhadap gugatan Penggugat. Namun, setelah mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak, Majelis Hakim memutuskan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh turut Tergugat. Pada pokok perkara, gugatan Penggugat ditolak secara keseluruhan, dan Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada 10 Juli 2024, yang dihadiri oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka pada 11 Juli 2024, dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari yang sama. Penggugat diwajibkan menanggung seluruh biaya perkara.

Penggugat mengajukan pengaduan ini melalui kuasa hukumnya sebagai upaya mendapatkan keadilan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat. Namun, pengadilan menolak semua gugatan dan eksepsi yang diajukan oleh Penggugat. Keputusan ini menunjukkan bahwa proses hukum yang ketat dan bukti yang kuat sangat penting dalam penyelesaian kasus hukum.

Pengadilan Negeri Slawi menekankan pentingnya prosedur dan bukti dalam penyelesaian kasus ini. Putusan ini menunjukkan bahwa tanpa bukti yang kuat, gugatan tidak dapat diterima. Hal ini menjadi pelajaran bagi para pihak untuk selalu menyediakan bukti yang jelas dan kuat dalam setiap pengaduan hukum. Proses hukum yang ketat ini juga mencerminkan pentingnya mematuhi prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kasus ini juga menyoroti peran penting Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani pengaduan konsumen terkait jasa keuangan. OJK bertanggung jawab memastikan bahwa penyedia jasa keuangan mematuhi semua regulasi yang berlaku dan melindungi hak-hak konsumen. Dalam hal ini, meskipun OJK menerima pengaduan dari Penggugat, pengadilan memutuskan bahwa bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk mendukung klaim Penggugat.

Putusan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses hukum dan pentingnya mengikuti prosedur yang ditetapkan. Keputusan ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang. Para pihak yang terlibat dalam kasus hukum diharapkan dapat belajar dari kasus ini tentang pentingnya menyediakan bukti yang valid dan mematuhi semua prosedur hukum yang berlaku.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjukkan independensi dalam menilai kasus berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku. Keputusan ini merupakan wujud keadilan yang diharapkan dapat memberikan pelajaran bagi semua pihak yang terlibat. Independensi ini penting untuk memastikan bahwa setiap putusan yang diambil oleh pengadilan didasarkan pada fakta dan bukti yang ada, tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun.

Kasus ini mencerminkan kompleksitas dan ketatnya proses hukum dalam menangani pengaduan terkait jasa keuangan. Dengan ditolaknya gugatan Penggugat dan dihukumnya Penggugat untuk membayar biaya perkara, pengadilan menunjukkan komitmennya untuk menegakkan keadilan berdasarkan bukti yang ada. Putusan ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak tentang pentingnya menyediakan bukti yang kuat dan mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan.

1. Sanusi, S., La Dee, M., Widyastuti, T. V., & Lubis, A. F. (2023). *Ilmu Hukum Implikasi Teknologi Dalam Perubahan Hukum.* PTT. Literasi Nusantara Abadi Grup. [↑](#footnote-ref-1)
2. Group, Shanghai Finance Institute PtoP Research. ‘’*Peer-to-Peer Lending With Chinese Characteristics: Development, Regulation and Outlook”*. Routledge, 2016. hlm 42 [↑](#footnote-ref-2)
3. Mayangsari, A. C., Hartati, S., & Widyastuti, T. V. (2024). *Tanggung Jawab Hukum dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving.* Penerbit NEM. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wang, Jiazhuo G., et al. “*Financing the Underfinanced*. Springer”, 2015. Hlm 14. [↑](#footnote-ref-4)
5. Keuangan, Otoritas Jasa. 2016. “*Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan”*. Otoritas Jasa Keuangan, hlm. 210 [↑](#footnote-ref-5)
6. Arner, Douglas W., et al. “*Research Handbook on Asian Financial Law”*. Edward Elgar Publishing, 2020. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*, hlm. 311 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*, hlm. 312 [↑](#footnote-ref-8)
9. Maulani, Denia, dan Vera Dwi Octavya. *“Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Konsumen”* Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan, vol. 9, no. 1, LPPM Universitas Ibn Khaldun Bogor, Apr. 2021, p. 25. Crossref, https://doi.org/10.32832/moneter.v9i1.5762. [↑](#footnote-ref-9)
10. Fuskhahti, H. A., & Widyastuti, T. V. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Endorsement Produk Kecantikan Ilegal.* Penerbit NEM. [↑](#footnote-ref-10)
11. NUGI, N. (2024). *Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Perlindungan Hak Konsumen Dalam Pinjaman Online* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). [↑](#footnote-ref-11)
12. Pettarani, A., Wijaya, M., Widyastuti, T. V., & Said, A. L. (2024*). Pengantar Kebijakan Publik : Teori dan Praktek.* Medan: Media Penerbit Indonesia [↑](#footnote-ref-12)
13. Pinjol: AdaKami diduga teror nasabah karena terlambat bayar cicilan - “Saya dibilang anak haram, orangtua dimaki dengan kasar.” (2023, September 22). Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz986dygeeyo [↑](#footnote-ref-13)
14. Aprilia, Shania. “Permasalahan Teknologi Keuangan Illegal di Indonesia.” ***Skripsi***, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2021. [↑](#footnote-ref-14)
15. Hamaris, Ahmad Maliandi. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Transaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman Online”. ***Skripsi***, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022. [↑](#footnote-ref-15)
16. Andriyana, Tina. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Data Pribadinya Dijual Di Aplikasi Fintech”. ***Skripsi***, Universitas Jember, 2020. [↑](#footnote-ref-16)
17. Hamzani, A. I., Idayanti, S., & Widyastuti, T. V. (2020). *Buku Panduan Penulisan Skripsi.* Yogyakarta: Tanah Air Beta. Hlm 3-4 [↑](#footnote-ref-17)
18. Creswell, J. W., & Creswell, D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* Edisi 6. Springer Nature. Hlm 55-65 [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.* Hlm 55-65 [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.* Hlm 55-65 [↑](#footnote-ref-20)
21. Ridley, D. (2012). *The Literature Review: A Step-by-Step Guide for Students*. SAGE Publications. Hlm 2-6 [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid.* Hlm 2-6 [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid.* Hlm 2-6 [↑](#footnote-ref-23)
24. Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson. Hlm 25-55 [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid.* Hlm 25- 55 [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid.* Hlm 25-55 [↑](#footnote-ref-26)
27. Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., Rusli, M. H. M. (2024). “Implementation Approach In Legal Research”. *International Journal of Advances in Applied Sciences (IJAAS),* 13(2), 180-188. http://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388 [↑](#footnote-ref-27)
28. Widyastuti, T. V., Marsisno, W., Udin, A. F., & Sutaguna, I. N. T. (2024). *Penelitian Transformatif; Mengatasi Isu-Isu Kontemporer Dengan Kombinasi Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Medan: Media Penerbit Indonesia [↑](#footnote-ref-28)
29. Sisma, Annisa Fianni. “Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.” Katadata, 18 Oct. 2022, katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum. [↑](#footnote-ref-29)
30. Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. (2023). “Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review”. International Journal of Membrane Science and Technology10, no. 2 (August 24, 2023): 3610-3619. Accessed December 1, 2023. [↑](#footnote-ref-30)
31. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm 3. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid* hlm 3. [↑](#footnote-ref-32)
33. Noor, R. S., Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., & Kristanto, K. (2024). Gender Equality in Indigenous Peoples in Indonesia (Challenges and Efforts Towards the 2030 Sustainable Development Goals). Journal of Law and Sustainable Development, 12(1), e2173-e2173. https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2173 [↑](#footnote-ref-33)
34. Indriasari, E., & Widyastuti, T. V. The Legal Protection for the Recognition of Customary Right in Agrarian Regulations. *International Journal of Law Reconstruction,* 8(1), 1-7. <http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v8i1.33826>. [↑](#footnote-ref-34)
35. Indriastuti, *“Memahami Kembali Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governe).”* Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik), vol. 10, no. 1, Universitas Wijaya Putra, Apr. 2022, pp. 60–75. Crossref, https://doi.org/10.38156/gjkmp.v10i1.76. [↑](#footnote-ref-35)
36. Damanik, P., Nugraha, S., Widyastuti, T. V., & Nur, F. (2024). *Hukum Administrasi Negara : Teori, Prinsip dan Praktik Tata Kelola Pemerintaha*n. Medan: Media Penerbit Indonesia. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid.* hlm. 12 [↑](#footnote-ref-37)
38. Maulindayani, *“Eksistensi Dalam Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia.”* *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, vol. 1, no. 1, Universitas Negeri Semarang, Jan. 2021, pp. 65–71. Crossref, https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i1.49859. [↑](#footnote-ref-38)
39. Casey, Catherine. *Critical Analysis of Organizations*. SAGE, 2002,. [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid* hlm.23 [↑](#footnote-ref-40)
41. Beetham, David. *Max Weber and the Theory of Modern Politics*. John Wiley and Sons, 2018. [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid hlm 23*. [↑](#footnote-ref-42)
43. *Ibid* hlm 23 [↑](#footnote-ref-43)
44. Si-Prince. *“Weber's Three Pillars of Legitimacy: Traditional, Legal-Rational, and Charismatic Authority - Sociology.”* Sociology Institute, March 27, 2024. https://sociology.institute/sociological-theories-concepts/webers-three-pillars-legitimacy-authority-types/. [↑](#footnote-ref-44)
45. *Ibid* [↑](#footnote-ref-45)
46. Drew, Chris. “11 Traditional Authority Examples (Max Weber Sociology) (2024).” Helpful Professor, June 17, 2024. https://helpfulprofessor.com/traditional-authority-examples/. [↑](#footnote-ref-46)
47. *Ibid* [↑](#footnote-ref-47)
48. Libretexts. *“17.2: Power and Authority.”* Social Sci LibreTexts, February 20, 2021. https://socialsci.libretexts.org/Bookshelves/Sociology/Introduction\_to\_Sociology/Introductory\_Sociology\_1e\_(OpenStax)/17%3A\_Government\_and\_Politics/17.02%3A\_Power\_and\_Authority. [↑](#footnote-ref-48)
49. Beetham, David. *Max Weber and the Theory of Modern Politics*. John Wiley and Sons, 2018. [↑](#footnote-ref-49)
50. Libretexts. *“17.2: Power and Authority.”* Social Sci LibreTexts, February 20, 2021. https://socialsci.libretexts.org/Bookshelves/Sociology/Introduction\_to\_Sociology/Introductory\_Sociology\_1e\_(OpenStax)/17%3A\_Government\_and\_Politics/17.02%3A\_Power\_and\_Authority. [↑](#footnote-ref-50)
51. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-51)
52. Beetham, David. *Max Weber and the Theory of Modern Politics*. John Wiley and Sons, 2018. [↑](#footnote-ref-52)
53. *Ibid* halaman 23 [↑](#footnote-ref-53)
54. Rosdiyanti, Evi. “PELAKSANAAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.” *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, vol. 3, no. 1, Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala, Mar. 2021. *Crossref*, https://doi.org/10.58258/jihad.v3i1.2348. [↑](#footnote-ref-54)
55. *Ibid*. hlm. 80 [↑](#footnote-ref-55)
56. *Ibid* 82 [↑](#footnote-ref-56)
57. Hadi, Rifai. *“3 Sumber Kewenangan Pemerintah Dan Contoh Atribusi, Delegasi, Serta Mandat | Rifaihadi.com.”* Rifaihadi.com, 8 Apr. 2022, www.rifaihadi.com/3-sumber-kewenangan-pemerintah. [↑](#footnote-ref-57)
58. Muhammad, Gandara. *“Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat.”* *Khazanah Hukum*, vol. 2, no. 3, Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung, Nov. 2020, pp. 92–99. *Crossref*, https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187. [↑](#footnote-ref-58)
59. Sisma, Annisa Fianni. *“Beda Atribusi, Delegasi, dan Mandat dalam UU Administasi Pemerintahan.”* *Katadata*, November 8, 2022. https://katadata.co.id/berita/nasional/636a04704995c/beda-atribusi-delegasi-dan-mandat-dalam-uu-administasi-pemerintahan. [↑](#footnote-ref-59)
60. SH, Sovia Hasanah. *“Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat,”* November 2, 2016. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7/. [↑](#footnote-ref-60)
61. Sisma, Annisa Fianni. *“Beda Atribusi, Delegasi, dan Mandat dalam UU Administasi Pemerintahan.”* *Katadata*, November 8, 2022. https://katadata.co.id/berita/nasional/636a04704995c/beda-atribusi-delegasi-dan-mandat-dalam-uu-administasi-pemerintahan. [↑](#footnote-ref-61)
62. Muhammad, Gandara. *“Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat.”* *Khazanah Hukum*, vol. 2, no. 3, Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung, Nov. 2020, pp. 92–99. *Crossref*, https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187. [↑](#footnote-ref-62)
63. Sisma, Annisa Fianni. *“Beda Atribusi, Delegasi, dan Mandat dalam UU Administasi Pemerintahan.”* *Katadata*, November 8, 2022. https://katadata.co.id/berita/nasional/636a04704995c/beda-atribusi-delegasi-dan-mandat-dalam-uu-administasi-pemerintahan. [↑](#footnote-ref-63)
64. SH, Sovia Hasanah. *“Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat,”* November 2, 2016. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7/. [↑](#footnote-ref-64)
65. *Ibid* [↑](#footnote-ref-65)
66. Sisma, Annisa Fianni. *“Beda Atribusi, Delegasi, dan Mandat dalam UU Administasi Pemerintahan.”* *Katadata*, November 8, 2022. https://katadata.co.id/berita/nasional/636a04704995c/beda-atribusi-delegasi-dan-mandat-dalam-uu-administasi-pemerintahan. [↑](#footnote-ref-66)
67. Muhammad, Gandara. *“Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat.”* *Khazanah Hukum*, vol. 2, no. 3, Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung, Nov. 2020, pp. 92–99. *Crossref*, https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187. [↑](#footnote-ref-67)
68. SH, Sovia Hasanah. *“Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat,”* November 2, 2016. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7/. [↑](#footnote-ref-68)
69. *Ibid* [↑](#footnote-ref-69)
70. Sisma, Annisa Fianni. *“Beda Atribusi, Delegasi, dan Mandat dalam UU Administasi Pemerintahan.”* *Katadata*, November 8, 2022. https://katadata.co.id/berita/nasional/636a04704995c/beda-atribusi-delegasi-dan-mandat-dalam-uu-administasi-pemerintahan. [↑](#footnote-ref-70)
71. Keuangan, Otoritas Jasa. 2016. “*Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan”*. Otoritas Jasa Keuangan, 2016, hlm. 21 [↑](#footnote-ref-71)
72. Keuangan, O. J. (2017). “Mengenal otoritas jasa keuangan dan industri jasa keuangan”. Diakses melalui https://sikapiuangmu. ojk. go. id/FrontEndCMS/Download/338 pada, 24. [↑](#footnote-ref-72)
73. Portal OJK. https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx [↑](#footnote-ref-73)
74. Rosyda, "Memahami Tugas OJK: Visi, Misi, Sejarah Fungsi, Wewenang." Gramedia Literasi, 26 June 2023, www.gramedia.com/literasi/tugas-ojk. [↑](#footnote-ref-74)
75. Ototritas Jasa Keuangan, “*Fakta Otoritas Jasa Keuangan.”,*https://ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx. [↑](#footnote-ref-75)
76. Keuangan, Otoritas Jasa. 2016. “*Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan”*. Otoritas Jasa Keuangan, 2016 hlm 4 [↑](#footnote-ref-76)
77. Yulianti, Y. (2023). *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pencegahan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Sektor Perbankan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 74. https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.333 [↑](#footnote-ref-77)
78. Marpaung, J. T. H., & Apriani, R. (2023). *Hubungan Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Bank Indonesia Dalam Melakukan Pemeriksaan Di Bidang Perbankan*. JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 6(2), 281. https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.281-291 [↑](#footnote-ref-78)
79. Idris, Muhammad. *“Mengenal OJK, Sejarah Berdiri, Tugas, Fungsi, Dan Wewenangnya.”* KOMPAS.com, 22 Jan. 2023, money.kompas.com/read/2021/11/27/144336726/mengenal-ojk-sejarah-berdiri-tugas-fungsi-dan-wewenangnya. [↑](#footnote-ref-79)
80. Sejarah OJK: Lembaga Pengawas Industri Jasa Keuangan Di Indonesia – Blog UI an Nur Lampung. an-nur.ac.id/blog/sejarah-ojk-lembaga-pengawas-industri-jasa-keuangan-di-indonesia.html. [↑](#footnote-ref-80)
81. Ototritas Jasa Keuangan, “Fakta Otoritas Jasa Keuangan.”,https://ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx [↑](#footnote-ref-81)
82. Bimo, Widhi Ariyo, and Raiza Pranita Sari. “Pelaksanaan Fungsi Perlindungan Konsumen Di Sektor Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.” Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan, vol. 7, no. 2, LPPM Universitas Ibn Khaldun Bogor, Oct. 2019, p. 66. Crossref, https://doi.org/10.32832/moneter.v7i2.2520. [↑](#footnote-ref-82)
83. Tentang OJK. (n.d.). Retrieved from https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx [↑](#footnote-ref-83)
84. Pikahulan, Rustam Magun. *“Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan.”* Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, vol. 1, no. 1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020. Crossref, https://doi.org/10.18196/jphk.1103. [↑](#footnote-ref-84)
85. Faizah, Niharotul; Ratih, Dewi; Mafudlo, Kamelia Elima’ana; & Abadi, Muhammad Tufiq. *"Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjaga Stabilitas dan Keamanan Sistem Keuangan.",* JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT, 2(1), 2024, pp. 135–144. https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.574 [↑](#footnote-ref-85)
86. Syauqoti, R., & Ghozali, M. (2018). A*nalisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional;* Iqitishoduna, 15–30. https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.4820 [↑](#footnote-ref-86)
87. Sandi, E. *"Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindugnan Hukum Nasabah Atas Penjualan Data Nasabah Bank."* Jurnal Idea Hukum, vol. 5, no. 2, 2019. https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.125 [↑](#footnote-ref-87)
88. Tentang OJK. (n.d.-b). Retrieved from https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx [↑](#footnote-ref-88)
89. *Ibid* [↑](#footnote-ref-89)
90. Yuannisa, Rizka Adlia; Nasution, Rizka;, and Marliyah Marliyah. *"Analisis Peran Perkembangan Financial Technology Berbasis Syariah: Peer To Peer Lending Dan Crowdfunding Di Indonesia."* Jurnal Sains Dan Teknologi, vol. 5, no. 2, 2023, pp. 664-68. http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/saintek/article/view/2292. [↑](#footnote-ref-90)
91. Pakpahan, M. E., Zulkifli, S., & Sunarto, A. (2022). *Perlindungan Hukum Pemberian Kredit Secara Digitalisasi Kepada Debitur Masa Perkembangan Financial Technology (FINTECH)*. Jurnal Rectum, 5(1), 120. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2561 [↑](#footnote-ref-91)
92. Monetary, International, and International Monetary Fund. *Monetary and Capital Markets Department. Global Financial Stability Report, October 2022*. International Monetary Fund, 2022, hal 54 books.google.ie/books?id=nOGUEAAAQBAJ&pg=PA88&dq=science+open+non+bank+financial+intermediation:+global+monitoring&hl=&cd=2&source=gbs\_api. [↑](#footnote-ref-92)
93. Utami, Fajria Anindya. *“Apa Itu Pinjaman Online?”* *Warta Ekonomi*, 30 Aug. 2021, wartaekonomi.co.id/read357688/apa-itu-pinjaman-online. [↑](#footnote-ref-93)
94. *Ibid* [↑](#footnote-ref-94)
95. JULO. “Apa Dampak Positif Pinjaman Online? Ketahui dan Manfaatkan Tanpa Rasa Khawatir,” n.d. https://www.julo.co.id/blog/apa-dampak-positif-pinjaman-online-ketahui-dan-manfaatkan-tanpa-rasa-khawatir.

    . [↑](#footnote-ref-95)
96. *Ibid* [↑](#footnote-ref-96)
97. *Ibid* [↑](#footnote-ref-97)
98. *Ibid* [↑](#footnote-ref-98)
99. Ototritas Jasa Keuangan, “*Fakta Otoritas Jasa Keuangan.”,*https://ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx [↑](#footnote-ref-99)
100. *Ibid* [↑](#footnote-ref-100)
101. *Ibid* [↑](#footnote-ref-101)
102. Cairin. *“Ciri Ciri Penipuan Pinjol via Media Social,”* n.d. https://www.cairin.id/blog/article/ciri-ciri-penipuan-pinjol-via-media-social/. [↑](#footnote-ref-102)
103. Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan*. “Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah,”* n.d. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html. [↑](#footnote-ref-103)
104. Unair, Pkip. *“Manajemen Risiko pada Pinjaman Online di Tengah Pandemi Covid-19*.” Universitas Airlangga Official Website, November 18, 2021. https://unair.ac.id/manajemen-risiko-pada-pinjaman-online-di-tengah-pandemi-covid-19/. [↑](#footnote-ref-104)
105. *Ibid* [↑](#footnote-ref-105)
106. Ananda, Candra Fajri. “*Menelisik Fenomena Pinjaman Online di Era Digital.”* *SINDOnews Nasional*, May 19, 2024. https://nasional.sindonews.com/read/1379935/18/menelisik-fenomena-pinjaman-online-di-era-digital-1716159922. [↑](#footnote-ref-106)
107. *Ibid* [↑](#footnote-ref-107)
108. *Ibid* [↑](#footnote-ref-108)
109. Chen, E., Afif, M. I., Jason, W., Sidauruk, C. F., & Anugrah, S. P. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Ilegal*. Prosiding Seri Seminar Nasional, 1(1), 2045–2052. https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.18080. [↑](#footnote-ref-109)
110. Hastasari, Ratih, *"Peran otoritas jasa keuangan terhadap fintech ilegal di indonesia sebagai upaya perlindungan pada konsumen."* Akrab Juara; Jurnal Ilmuilmu Sosial, vol. 5, no. 3, 2020, 25-38. https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1162. [↑](#footnote-ref-110)
111. *Ibid* hal 27 [↑](#footnote-ref-111)
112. Ojk, *“Penting! Simak Bedanya, Ini Ciri-Ciri Pinjol Legal Dan Ilegal*,” Indonesia Capital Market Information Center, n.d., https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20463. [↑](#footnote-ref-112)
113. *Ibid* [↑](#footnote-ref-113)
114. *Ibid* [↑](#footnote-ref-114)
115. OCB, *“Ini Dia Cara Melakukan Pinjaman Online agar Cepat Cair!,”* February 20, 2023. https://www.ocbc.id/id/article/2023/02/20/cara-melakukan-pinjaman-online. [↑](#footnote-ref-115)
116. *Ibid* [↑](#footnote-ref-116)
117. *Ibid* [↑](#footnote-ref-117)
118. Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan*. “Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah,”* n.d. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html [↑](#footnote-ref-118)
119. *Ibid* [↑](#footnote-ref-119)
120. Indonesia, Generali. *“Cara Memahami Kredit dan Skor Kredit dalam Mengatur Keuangan,”* n.d. https://www.generali.co.id/id/healthyliving/healthy-wealth/cara-memahami-kredit-dan-skor-kredit-dalam-mengatur-keuangan. [↑](#footnote-ref-120)
121. OJK,“Infografis OJK Bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal,” n.d. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx. [↑](#footnote-ref-121)
122. *Ibid* [↑](#footnote-ref-122)
123. HSBC Indonesia,*“Memahami Pinjaman Online yang Aman dan Legal,*”. https://www.hsbc.co.id/1/PA\_esf-ca-app-content/content/indonesia/personal/offers/news-and-lifestyle/files/articles/html/201907/memahami-pinjaman-online-yang-aman-dan-legal.html. [↑](#footnote-ref-123)
124. *Ibid* [↑](#footnote-ref-124)
125. Otoritas Jasa Keuangan. *Apa Itu Pinjaman Online Illegal?* https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20441 [↑](#footnote-ref-125)
126. Hastasari, Ratih, *"Peran otoritas jasa keuangan terhadap fintech ilegal di indonesia sebagai upaya perlindungan pada konsumen."* Akrab Juara; Jurnal Ilmuilmu Sosial, vol. 5, no. 3, 2020, Hal 25-38. https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1162. [↑](#footnote-ref-126)
127. Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. *“Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online.”* Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 2, no. 1 (February 2, 2022): 73–87. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736. [↑](#footnote-ref-127)
128. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-128)
129. Hidayah, Ahmad. “Membongkar Sisi Gelap Fintech Peer-to-Peer Lending (Pinjaman Online) pada Mahasiswa di Yogyakarta.” *Journal of Humanity Studies*. Vol. 1, 2022. https://ejournal.upgrisba.ac.id/index.php/jhs/index. [↑](#footnote-ref-129)
130. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-130)
131. *Ibid* [↑](#footnote-ref-131)
132. Ojk, *“Penting! Simak Bedanya, Ini Ciri-Ciri Pinjol Legal Dan Ilegal*,” Indonesia Capital Market Information Center, n.d., https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20463. [↑](#footnote-ref-132)
133. *Ibid* [↑](#footnote-ref-133)
134. *Ibid* [↑](#footnote-ref-134)
135. Nurhayati, Iin Indriani, and Tahta Anedea. *“Penyuluhan Tentang Pinjaman Online Kepada Masyarakat Desa Cihuni Tangerang.”* Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 5. Universitas Pamulang, January 2024. http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL. [↑](#footnote-ref-135)
136. *Ibid* [↑](#footnote-ref-136)
137. Otoritas Jasa Keuangan, “Waspada! Pinjaman Online Ilegal”. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Waspada!-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx [↑](#footnote-ref-137)
138. Zacky, A. *“Pinjaman Online dan Pengaruhnya di Indonesia. Kumparan”*. 2023, January 18, https://kumparan.com [↑](#footnote-ref-138)
139. Tarantang, J., Pelu, I. E. a. S., Akbar, W., Kurniawan, R., & Wahyuni, A. S. *“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dalam Transaksi Digital”*. Morality/Morality: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 15. 2023 https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.321 [↑](#footnote-ref-139)
140. Rayhan, A., Apriani, R., & Avionita, V. "*Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Bertransaksi Menggunakan Platform E-Commerce Dengan Perpektif Hukum Perlindungan Konsumen."* NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, vol. 10, no. 11, 2023, pp. 5214-5223. https://doi.org/10.31604/jips.v10i11.2023.5214-5223. [↑](#footnote-ref-140)
141. SE, Vivian Tjandra, and Rizky Hariyadi M. Acc. Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah. CV Brimedia Global, 2023. [↑](#footnote-ref-141)
142. Masriyani, M., Siregar, N. O., & Tresya, T. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Penyebaran Data Pribadi yang Dilakukan oleh Aplikasi Pinjaman Online Ilegal. Wajah Hukum, 8(1), 249. https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1459. [↑](#footnote-ref-142)
143. Otoritas Jasa Keuangan.*” Frequently Asked Questions Otoritas Jasa Keuangan”* 2017 https://ojk.go.id/id/Pages/Frequently-Asked-Questions-OJK.aspx [↑](#footnote-ref-143)